

**PENGARUH INFLASI, PENDIDIKAN, DAN RATA-RATA
PENGELUARAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA**

Thesis

Oleh

Beta Mustika Wati

NPM 2321021011



**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENGARUH INFLASI, PENDIDIKAN, DAN RATA-RATA PENGELUARAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh

BETA MUSTIKA WATI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, pendidikan, dan rata-rata pengeluaran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam periode 2015-2024. Kemiskinan dipahami sebagai fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai variabel makroekonomi dan struktural. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode analisis data panel, yang menggabungkan data antarprovinsi (*cross section*) dan antarwaktu (*time series*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, variabel inflasi, pendidikan, dan rata-rata pengeluaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara parsial, pendidikan ditemukan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Sebaliknya, rata-rata pengeluaran menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, di mana kenaikan pengeluaran nominal sering kali mencerminkan tekanan beban biaya hidup atau "konsumsi terpaksa" (*distress consumption*) akibat kenaikan harga, bukan peningkatan kesejahteraan riil. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*), model penelitian ini mampu menjelaskan sekitar 35 persen variasi kemiskinan di Indonesia, sementara 65 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model seperti kualitas layanan publik, akses kesehatan, dan ketimpangan pendapatan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta penguatan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Inflasi, Pendidikan, Rata-Rata Pengeluaran, Data Panel.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF INFLATION, EDUCATION, AND AVERAGE EXPENDITURE ON POVERTY IN INDONESIA

By

BETA MUSTIKA WATI

This study aims to analyze the influence of inflation, education, and average expenditure on poverty levels in Indonesia during the period 2015-2024. Poverty is understood as a multidimensional phenomenon influenced by various macroeconomic and structural variables. The data used in this study covers 34 provinces in Indonesia, employing a panel data analysis method that combines cross-sectional data across provinces and time-series data. The results indicate that, simultaneously, the variables of inflation, education, and average expenditure have a significant impact on poverty levels in Indonesia. Partially, education is found to have a significant negative effect on poverty, reinforcing the premise that improving the quality of human resources through education is a primary key to breaking the cycle of poverty. Conversely, average expenditure shows a significant positive effect on poverty, where increases in nominal expenditure often reflect the pressure of living costs or "distress consumption" due to price hikes, rather than an actual increase in real welfare. Based on the results of the coefficient of determination (Adjusted R-Square), this research model is able to explain approximately 35 percent of the variation in poverty in Indonesia, while the remaining 65 percent is influenced by other factors outside the model, such as the quality of public services, access to healthcare, and income inequality. The policy implications of this study emphasize the importance of integrated poverty reduction strategies through the stabilization of basic commodity prices, improvement of educational access and quality, and the sustainable strengthening of public purchasing power.

Keywords: *Poverty, Inflation, Education, Average Expenditure, Panel Data.*

**PENGARUH INFLASI, PENDIDIKAN, DAN RATA-RATA
PENGELUARAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA**

Oleh

BETA MUSTIKA WATI

Tesis

Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar

MASTER EKONOMI

Pada

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis : **PENGARUH INFLASI, PENDIDIKAN, DAN RATA-RATA PENGELUARAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Beta Mustika Wati**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2321021011**

Program Studi : **Magister Ilmu Ekonomi**

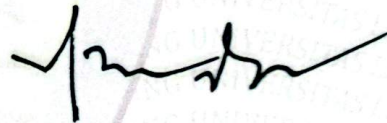
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

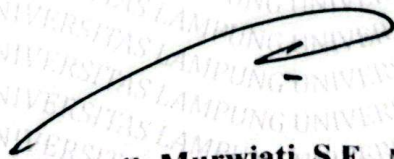


Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.
NIP. 196112091988031003



Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.
NIP. 196312151989032002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

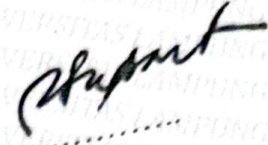


Dr. Asih Murwiati, S.E., M.Si.
NIP. 19740410 200812 2 001

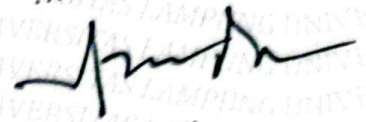
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji :

Ketua : Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.



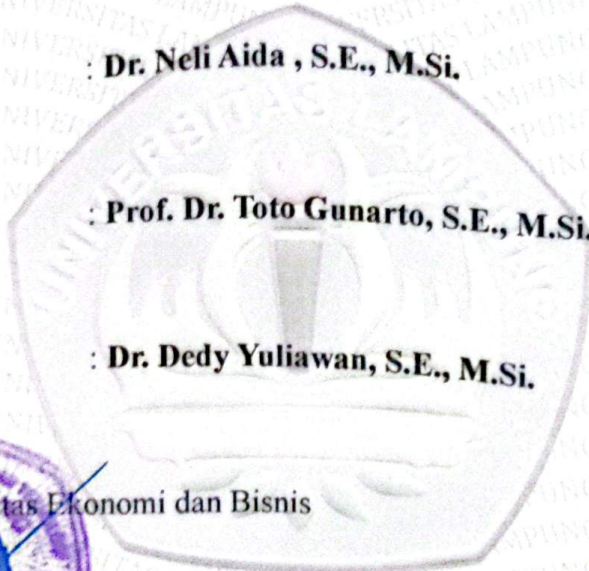
Sekretaris : Dr. Neli Aida, S.E., M.Si.



Penguji I : Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.



Penguji II : Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si.

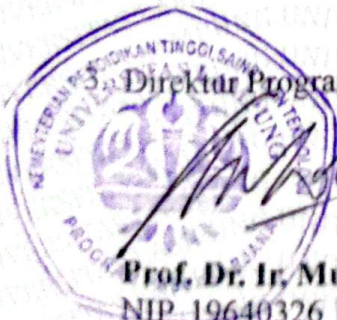


2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nainabi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 12 Februari 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa TESIS ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Januari 2016



Beta Mustika Wati

RIWAYAT HIDUP



Nama : Beta Mustika Wati
Tempat/Tanggal Lahir : Tugu Papak, 28 Agustus 2000
Alamat : Tugu Papak, Kecamatan Semaka
Tanggamus
No. Hp : 085783330492
Email : betamustika28820@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 1 Tugu Papak
SMP : SMP Negeri 1 Semaka
SMA : MA Swasta Roudlotul Huda Lampung Tengah
S1 : UIN Jurai Siwo Metro
(Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi
Syariah)
S2 : Universitas Lampung
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Magister Ilmu
Ekonomi)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati untuk :

Ayahandaku dan Ibundaku, orang tua yang begitu luar biasa yang telah membesarkan dan mendidik anak-anaknya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang serta selalu memberikan doa dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.

Dosen-dosen Magister Ilmu Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung serta sahabat-sahabat yang senantiasa memberikan saran, motivasi, dan doa dalam mengerjakan tesis ini.

Tak Lupa Almamater tercinta Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

“Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Makna dari hadits riwayat Jami' at-Tirmidzi)

*It doesn't matter how slow you go, **as long as you don't stop.***

-Confucius

SANWACANA

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat serta hidayah-Nya, penulis masih bisa merasakan segala nikmat dan anugerah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengaruh Inflasi, Pendidikan, Dan Rata-Rata Pengeluaran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia”.

Adapun maksud dalam penulisan tesis ini adalah guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Master Ekonomi pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis telah banyak memperoleh bimbingan, bantuan serta motivasi dari semua pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Asih Murwiati, S.E., M.E., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran perbaikan dan nasehat yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang begitu sabar dan luar biasa dalam memberikan arahan, kritik, ilmu dan sumbangan pemikiran dalam proses penyelesaian tesis ini.

6. Ibu Dr. Neli Aida T, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang begitu sabar dan selalu mendukung dalam memberikan kritik, ilmu dan sumbangan pemikiran dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Prof. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si., dan Bapak Dr. Dedy Yulawan. S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan nasehat yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Ekonomi Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan membantu selama penulis menyelesaikan masa pendidikan.
9. Mba Ita sebagai Admin Magister Ilmu Ekonomi yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan tesis, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Ayahandaku Tugino. dan Ibundaku Rida Wati yang begitu luar biasa dan selalu memberikan doa, serta dukungan demi kesuksesan penulis.
11. Adikku Iqbal Maulana yang memberikan do'a beserta dukungan dan motivasi.
12. Kepada teman-teman Magister Ilmu Ekonomi Tahun 2023 dan 2022 khususnya Dayana, Wulan, Nadia, Aman, Mas Rama, Mas Adi, Bang Gharas, Etika yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir.

Semoga Allah SWT mempermudah segala urusan kita. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia	5
Gambar 2. Data Inflasi Indonesia.....	8
Gambar 3. Data Rata-Rata Lama Sekolah	10
Gambar 4. Data Rata-Rata Pengeluaran.....	13
Gambar 6. Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 7. Uji Normalitas	63

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	1
DAFTAR GAMBAR	1
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Tinjauan Teoritis	20
2.1.1 Kemiskinan.....	20
2.2.1 Inflasi	23
2.3.1 Pendidikan	27
2.4.1 Rata-Rata Pengeluaran	30
2.6 Tinjauan Emperis.....	33
2.7 Kerangka Berfikir.....	38
2.8 Hipotesis.....	39
III. METODELOGI PENELITIAN	40
3.1 Jenis Dan Ruang Lingkup Penelitian	40
3.2 Definisi Operasional.....	42
3.2.1 Kemiskinan.....	42
3.2.2 Inflasi	43
3.2.3 Pendidikan	43
3.2.4 Rata-Rata Pengeluaran.....	44
3.3 Metode Analisis.....	45
3.4 Prosedur Analisis Data	46
3.4.1 Metode Regresi Data Panel	46
3.4.2 Pengujian Asumsi Klasik.....	48
3.4.3 Pemilihan Regresi Model Data Panel	50
3.4.4 Uji Hipotesis	51

3.4.5 Uji Koefisien Determinasi	53
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	54
4.2.1 Kemiskinan	55
4.2.2 Inflasi.....	57
4.2.3 Pendidikan.....	58
4.2.4 Rata-Rata Pengeluaran.....	60
4.3 Hasil Penelitian.....	62
4.3.1 Metode Estimasi Regresi Data Panel	62
4.3.2 Pengujian Asumsi Klasik	62
4.3.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel	65
4.3.4 Uji Hipotesis.....	67
4.3.5 Uji Koefisien Determinasi.....	69
4.4 Pembahasan	71
4.4.1 Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.....	71
4.4.2 Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia.....	77
4.4.3 Pengaruh Rata-Rata Pengeluaran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia	81
4.4.4 Hasil Uji F	85
4.5 Implikasi Kebijakan	89
V. KESIMPULAN DAN SARAN	91
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan ekonomi dan sosial paling kompleks yang terus menjadi tantangan utama dalam pembangunan global. Pada abad ke-20 hingga awal abad ke-21, isu kemiskinan tetap relevan dan krusial untuk dibahas seiring dengan semakin luasnya kesenjangan kesejahteraan antarkelompok masyarakat. Kemiskinan tidak sekadar ditandai oleh ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar karena kekurangan pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap sumber daya esensial seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta perlindungan sosial yang memadai. Dengan demikian, kemiskinan dipahami sebagai kondisi multidimensional yang berakar pada ketidaksetaraan struktural dalam sistem sosial dan ekonomi (Sen, 1999).

Hingga kini, kemiskinan tetap menjadi persoalan mendasar yang dihadapi banyak negara di dunia. Meskipun berbagai strategi pembangunan telah diterapkan selama beberapa dekade, kenyataannya kemiskinan masih muncul sebagai masalah yang kompleks dan sulit diatasi sepenuhnya. Perubahan struktur ekonomi, dinamika sosial, serta ketimpangan akses terhadap berbagai sumber daya menjadikan isu ini semakin sulit ditangani dengan pendekatan tunggal. Dalam perspektif Sen (1999), kemiskinan bukan sekadar kekurangan materi, tetapi merupakan kegagalan individu dalam mengakses kapasitas hidup yang bernilai dan esensial.

Dalam konteks global, tantangan kemiskinan semakin menonjol setelah terjadinya pandemi COVID-19. Laporan UNDP (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 70 juta orang kembali masuk kategori miskin ekstrem akibat terpukulnya aktivitas ekonomi dan melemahnya sistem perlindungan sosial di berbagai negara. Negara berpendapatan menengah ke bawah menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat, sehingga ruang untuk menyediakan bantuan sosial dan layanan publik menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi semata tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan yang tinggi pun

tidak selalu menjamin pemerataan kesejahteraan apabila tidak disertai kebijakan yang berorientasi pada pemerataan akses serta keadilan sosial dan ekonomi.

Pendekatan multidimensi dalam memahami kemiskinan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat rentan. Kemiskinan tidak berhenti pada aspek pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai deprivasi dalam kehidupan seperti gizi, kesehatan, pendidikan, sanitasi, perumahan, dan partisipasi sosial. Alkire dan Foster (2011) mengembangkan kerangka pengukuran kemiskinan multidimensi yang mampu menangkap beragam bentuk kekurangan tersebut. Pendekatan ini membantu pemerintah memahami kondisi kesejahteraan masyarakat secara lebih realistis sehingga kebijakan yang dirancang dapat lebih tepat sasaran.

Di kawasan Asia Tenggara, kemiskinan masih menjadi isu yang signifikan, terutama di negara-negara dengan kualitas pendidikan dan produktivitas tenaga kerja yang belum optimal. Bank Pembangunan Asia (ADB) mencatat bahwa negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Banyak rumah tangga bergantung pada sektor informal yang rentan terhadap guncangan eksternal. Rendahnya kualitas pendidikan turut membatasi keterampilan tenaga kerja, sehingga peluang memperoleh pekerjaan layak semakin kecil. Kondisi tersebut mencerminkan adanya hambatan struktural yang dialami masyarakat dari waktu ke waktu (Bird et al., 2011).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk besar menghadapi tantangan yang kompleks dalam menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 2023, penduduk Indonesia mencapai sekitar 278,69 juta jiwa (BPS, 2023). Pertumbuhan penduduk yang cepat, diiringi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, membuat sebagian masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Ketika daya beli stagnan sementara harga-harga meningkat, kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling terdampak. Selain itu, praktik korupsi, lemahnya tata kelola pemerintahan, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta konflik sosial turut memperburuk distribusi kesejahteraan. World Bank (2022) menyoroti bahwa rendahnya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan belum optimalnya

penyediaan layanan publik menjadi hambatan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dinamika kemiskinan di negara-negara ASEAN dari tahun 2015 hingga 2023 menunjukkan variasi yang cukup besar antarnegara. Malaysia dan Thailand berhasil mempertahankan tingkat kemiskinan yang rendah, dengan Malaysia mendekati 0% selama periode tersebut dan Thailand mengalami penurunan dari sekitar 8% menjadi 6%. Keberhasilan ini mencerminkan sistem perlindungan sosial yang relatif kuat serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Sementara itu, Vietnam dan Filipina menunjukkan penurunan signifikan dalam angka kemiskinan. Vietnam berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari sekitar 13% pada tahun 2015 menjadi 5% pada tahun 2023. Filipina juga menunjukkan perkembangan positif, dari lebih dari 20% pada tahun 2015 hingga mendekati 1% pada tahun 2023, terutama berkat meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Sebaliknya, beberapa negara seperti Myanmar dan Laos memperlihatkan stagnasi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Myanmar bertahan pada kisaran 25%–26% selama hampir satu dekade dan hanya mengalami sedikit perbaikan pada tahun 2023. Laos menunjukkan tingkat kemiskinan yang relatif stabil pada angka 17%–18%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa capaian dan tantangan pengentasan kemiskinan di ASEAN masih bervariasi secara signifikan antarnegara (World Bank, 2020).

Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempercepat penurunan kemiskinan secara berkelanjutan. Meskipun berbagai kebijakan dan program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, kemiskinan tetap menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan. Kesenjangan sosial, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah terus memperkuat siklus kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Singapura, capaian Indonesia masih tertinggal dalam hal pembangunan manusia dan pemerataan kesejahteraan. Singapura yang pada awal kemerdekaannya menghadapi keterbatasan sumber daya alam, kini berhasil

bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi. Menurut World Bank (2022), Singapura menempati peringkat ketiga di dunia dalam pendapatan per kapita, menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada efektivitas strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara konseptual, kemiskinan menggambarkan kondisi kekurangan sumber daya ekonomi yang umumnya diukur berdasarkan rendahnya pendapatan per kapita atau konsumsi rumah tangga. Seseorang dikategorikan miskin apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan. Penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat 1-4. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Indonesia Pintar (PIP), serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Komitmen global terhadap pengurangan kemiskinan juga tercermin dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* yang melahirkan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Tujuan pertama SDGs menargetkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya. Indonesia mendukung agenda tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta mengintegrasikannya ke dalam RPJMN dan berbagai Rencana Aksi Nasional.

Meskipun berbagai kebijakan telah dilaksanakan, penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia masih berjalan relatif lambat. Data BPS menunjukkan tren penurunan yang cenderung stagnan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, capaian Indonesia memerlukan evaluasi dan penguatan strategi. Salah satu pendekatan untuk memahami dinamika tersebut adalah dengan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan. Berbagai determinan seperti inflasi, tingkat pendidikan, dan rata-rata pengeluaran diperkirakan memiliki hubungan signifikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dalam periode 2015-2024.



Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2024
Sumber: BPS (2024)

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara, karena berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin rendah angka kemiskinan, semakin baik pula kualitas hidup masyarakat secara umum. Berdasarkan gambar 1, data jumlah penduduk miskin di Indonesia periode 2015-2024 (data bulan Maret), terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2015, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 28,59 juta orang. Angka tersebut kemudian mengalami penurunan secara bertahap hingga tahun 2019 menjadi 25,14 juta orang. Penurunan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, peningkatan kesempatan kerja, perbaikan upah minimum di berbagai daerah, serta perluasan program perlindungan sosial seperti bantuan sosial, subsidi pangan, dan jaminan kesehatan nasional.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang masif pada periode tersebut turut membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Stabilitas harga kebutuhan pokok dan terkendalinya inflasi juga berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ini secara bertahap mendorong penurunan jumlah penduduk yang berada di bawah

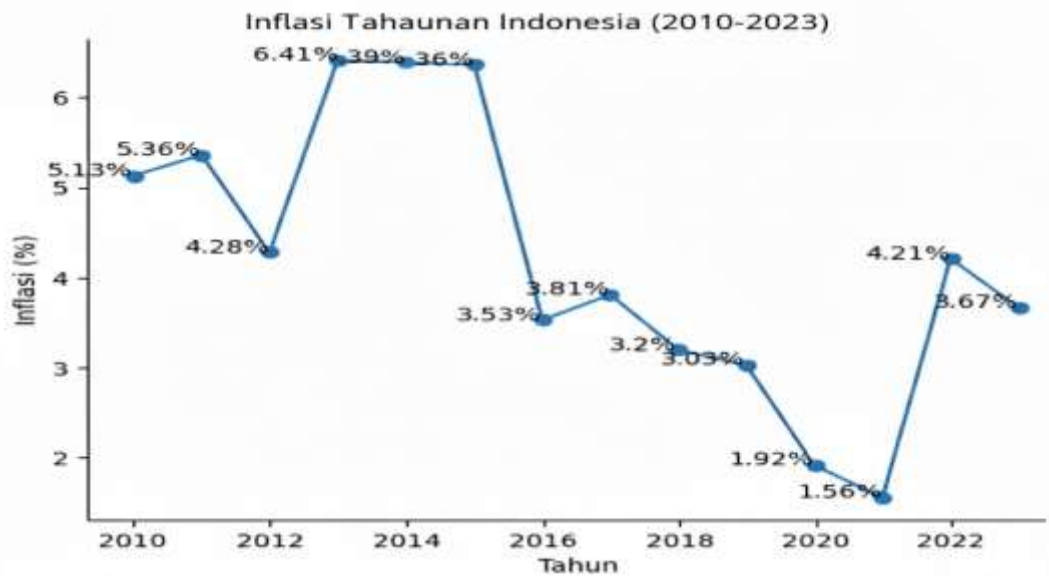
garis kemiskinan. Namun, tren positif tersebut mengalami gangguan pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 26,42 juta orang dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 27,54 juta orang. Kenaikan ini erat kaitannya dengan pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi secara global maupun nasional. Banyak sektor usaha mengalami penurunan produksi bahkan penutupan, sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan pendapatan, dan berkurangnya jam kerja. Sektor informal yang menyerap banyak tenaga kerja juga terdampak secara signifikan.

Selain faktor kehilangan pekerjaan, pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi turut menekan pendapatan rumah tangga, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Ketidakstabilan ekonomi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan. Memasuki tahun 2022 hingga 2024, jumlah penduduk miskin kembali menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 25,22 juta orang. Penurunan ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi, meningkatnya aktivitas industri dan perdagangan, serta kembalinya mobilitas masyarakat secara normal. Pemerintah juga memperkuat berbagai program bantuan sosial, subsidi energi, bantuan langsung tunai, serta program pemberdayaan UMKM untuk menjaga daya beli masyarakat.

Meskipun demikian, angka 25,22 juta orang menunjukkan bahwa masih terdapat lebih dari 25 juta penduduk Indonesia yang hidup dalam kondisi miskin. Hal ini menandakan bahwa tantangan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro, tetapi juga oleh faktor struktural seperti ketimpangan pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja formal, serta perbedaan pembangunan antarwilayah. Secara umum, data tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung menurun dalam jangka panjang, namun sangat rentan terhadap guncangan ekonomi dan krisis global. Secara konseptual, kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai variabel makroekonomi dan struktural. Inflasi menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan kesejahteraan masyarakat miskin. Ackley (1963) mendefinisikan inflasi sebagai

kenaikan harga umum secara terus-menerus dengan laju yang relatif tinggi, dan dampaknya sering kali lebih berat dirasakan oleh kelompok berpendapatan rendah. Kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti pangan dan energi, menggerus daya beli dan meningkatkan pengeluaran dasar rumah tangga miskin, sehingga memperburuk kerentanan ekonomi mereka. Selain itu, faktor pendidikan juga berperan penting dalam menentukan peluang keluar dari kemiskinan. Akses pendidikan yang rendah dan keterbatasan kualitas pembelajaran menyebabkan kesenjangan keterampilan (*skill gap*) yang berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya peluang kerja yang layak. Ketimpangan antarwilayah, dominasi pekerjaan informal, dan rendahnya mobilitas sosial turut memperkuat siklus kemiskinan terutama di daerah pedesaan dan wilayah 3T (Tertinggal Terdepan Terluar).

Dengan demikian, meskipun grafik menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam menurunkan kemiskinan secara signifikan selama lebih dari dua dekade, fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai capaian yang sepenuhnya final. Penurunan kemiskinan bersifat rentan terhadap gejolak ekonomi, perubahan kebijakan, dan dinamika global. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan perlu mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup stabilisasi harga, perluasan akses pendidikan berkualitas, penciptaan lapangan kerja produktif, penguatan perlindungan sosial adaptif, serta pengurangan ketimpangan antarwilayah. Pendekatan yang lebih terintegrasi diharapkan mampu menciptakan fondasi yang kuat untuk pengentasan kemiskinan secara jangka panjang dan berkelanjutan.



Gambar 2. Data Inflasi Indonesia Tahun 2011-2023
Sumber: BPS (2023)

Berdasarkan gambar 2, data jumlah penduduk miskin di Indonesia periode 2015-2024, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan yang diawali dengan tren penurunan stabil pada tahun 2015 sebesar 28,59 juta orang hingga mencapai titik terendah sebelum pandemi pada tahun 2019 di angka 25,14 juta orang. Penurunan konsisten ini merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, peningkatan kesempatan kerja, serta perluasan jangkauan program perlindungan sosial seperti bantuan pangan dan jaminan kesehatan nasional yang didukung oleh pembangunan infrastruktur masif di berbagai wilayah.

Namun, grafik tersebut memperlihatkan tantangan besar ketika pandemi Covid-19 melanda, yang menyebabkan jumlah penduduk miskin melonjak kembali hingga puncaknya pada tahun 2021 sebesar 27,54 juta orang. Fenomena ini terjadi akibat pembatasan aktivitas sosial yang memicu perlambatan produksi, pemutusan hubungan kerja (PHK) secara luas, serta penurunan pendapatan pada sektor informal yang menyerap banyak tenaga kerja. Memasuki fase pemulihan pada tahun 2022 hingga 2024, Indonesia menunjukkan resiliensi yang kuat dengan berhasil menekan kembali jumlah penduduk miskin hingga angka 25,22 juta orang pada Maret 2024. Meskipun tren jangka panjang menunjukkan arah

penurunan, angka 25 juta jiwa tersebut mencerminkan adanya tantangan struktural yang nyata, seperti ketimpangan akses terhadap lapangan kerja formal dan perbedaan kecepatan pembangunan antarwilayah.

Keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi. Menelaah data Inflasi Tahunan Indonesia periode 2010-2023, Indonesia telah melewati fase fluktuasi yang kompleks, di mana pada tahun 2013 hingga 2015 inflasi sempat melonjak tajam menyentuh angka 6,36% hingga 6,41%. Lonjakan ini utamanya dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi. Sejak tahun 2016, koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah berhasil menjaga inflasi pada level yang lebih rendah dan stabil di bawah 4%, yang sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan. Data inflasi menunjukkan penurunan tajam hingga mencapai titik terendah pada tahun 2021 di angka 1,56%, sebuah refleksi dari pelemahan permintaan domestik selama masa pandemi. Namun, seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi global, inflasi kembali mengalami tekanan hingga angka 4,21% pada tahun 2022 akibat kenaikan harga energi dunia, sebelum akhirnya melandai kembali ke level 3,67% pada tahun 2023.

Fluktuasi inflasi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan tingkat kemiskinan. Siregar dan Wahyuni (2021) menemukan bahwa kenaikan inflasi mendorong meningkatnya jumlah penduduk miskin melalui penurunan daya beli. Wicaksono (2019) menegaskan bahwa dampak inflasi terutama dirasakan oleh kelompok berpenghasilan rendah karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk konsumsi kebutuhan pokok. Penelitian Saputri dan Maulana (2022) juga menunjukkan bahwa inflasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan kemiskinan di wilayah perkotaan, di mana masyarakat sangat bergantung pada mekanisme pasar.

Namun, sejumlah penelitian lain memberikan perspektif berbeda. Rizky (2018) menemukan bahwa dalam jangka panjang, inflasi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan karena kebijakan pemerintah dalam stabilisasi harga dan bantuan sosial mampu meredam tekanan inflasi. Yuliani dan Hamdan (2020) juga menegaskan bahwa inflasi tidak bekerja secara langsung terhadap kemiskinan, melainkan dipengaruhi oleh variabel lain seperti pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Karim (2021) menambahkan bahwa daerah yang memiliki sistem subsidi pangan dan energi yang kuat cenderung lebih tahan terhadap dampak inflasi sehingga pengaruhnya terhadap kemiskinan tidak signifikan secara statistik. Meskipun inflasi merupakan salah satu variabel yang paling memengaruhi kesejahteraan rumah tangga, dampaknya terhadap tingkat kemiskinan tidak seragam di seluruh daerah dan sangat dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan pemerintah. Stabilitas harga tetap menjadi kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.



Gambar 3. Data Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2015-2023

Sumber: BPS (2023)

Upaya pengentasan kemiskinan tersebut berjalan beriringan dengan pengendalian stabilitas harga yang tercermin dalam data Inflasi Tahunan Indonesia periode 2010-2023. Stabilitas inflasi menjadi faktor yang sangat krusial karena fluktuasi harga kebutuhan pokok berdampak langsung pada daya beli masyarakat,

khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Indonesia tercatat pernah menghadapi tantangan inflasi yang cukup berat pada periode 2013-2015 di kisaran 6,36% hingga 6,41% akibat kebijakan penyesuaian harga energi. Namun, melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang solid, inflasi dapat dijaga pada level yang lebih terkendali di bawah 4% pada periode-periode berikutnya, bahkan menyentuh titik terendah 1,56% pada tahun 2021. Pengendalian inflasi yang efektif ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang vital dalam mencegah masyarakat rentan jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan akibat lonjakan biaya hidup yang tidak terduga.

Di samping stabilitas ekonomi makro, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal jangka panjang juga menunjukkan kemajuan konsisten sebagaimana terlihat pada data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia periode 2010-2023. Berbeda dengan indikator ekonomi yang cenderung fluktuatif terhadap guncangan global, kualitas pendidikan menunjukkan tren penguatan yang kokoh dan linear dengan peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dari 7,46 tahun pada 2010 menjadi 8,77 tahun pada 2023. Capaian ini mencerminkan keberhasilan kebijakan wajib belajar serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan formal sebagai modal utama untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Dengan rata-rata pendidikan yang kini mendekati 9 tahun atau setara tamat Sekolah Menengah Pertama, masyarakat memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk mengakses lapangan kerja formal yang menawarkan upah layak dan perlindungan sosial yang lebih menjamin.

Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah ini berkontribusi langsung pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di berbagai daerah melalui penciptaan tenaga kerja yang lebih terdidik dan adaptif terhadap inovasi teknologi. Kondisi ini pada gilirannya meningkatkan daya saing ekonomi nasional di kancah global serta membawa transformasi sosial-ekonomi yang lebih luas, seperti perbaikan pola hidup sehat dan perencanaan keluarga yang berkualitas. Secara keseluruhan, integrasi antara pengentasan kemiskinan, stabilitas inflasi, dan investasi besar pada kapasitas manusia melalui sektor pendidikan menegaskan bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek,

melainkan sedang membangun fondasi yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan kompetitif dalam jangka panjang.

Dari perspektif pembangunan ekonomi, pendidikan memiliki fungsi strategis sebagai investasi modal manusia (*human capital investment*). Teori modal manusia menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar potensi produktivitas, pendapatan, dan peluang mobilitas ekonomi yang dapat dicapai. Temuan empiris yang mendukung pandangan ini sangat kuat. Nasution dan Wardani (2019) menyatakan bahwa peningkatan pendidikan mampu memperluas peluang kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, sehingga menurunkan risiko kemiskinan. Amran dan Lestari (2021) menemukan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki struktur ekonomi lebih dinamis dan penyerapan tenaga kerja formal yang lebih besar. Selain itu, Putra dan Wahyuningsih (2022) menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, sehingga masyarakat berpendidikan lebih mampu menghadapi volatilitas ekonomi global dan perubahan struktur pasar kerja.

Namun, hubungan antara pendidikan dan penurunan kemiskinan tidak bersifat otomatis atau linier. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan tidak selalu menghasilkan pengurangan kemiskinan apabila tidak ditopang oleh faktor struktural yang memadai. Hasanah (2020) menemukan bahwa di beberapa daerah tertinggal, peningkatan pendidikan belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan akibat minimnya ketersediaan lapangan kerja formal yang relevan dengan kompetensi lulusan. Simanjuntak (2019) juga menunjukkan bahwa lulusan pendidikan menengah di beberapa wilayah mengalami tingginya tingkat pengangguran terselubung karena ketidaksesuaian antara keterampilan yang diperoleh di sekolah dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara itu, Yusuf dan Rahmawati (2021) menekankan bahwa pendidikan baru efektif dalam menurunkan kemiskinan apabila didukung oleh kualitas institusi pendidikan yang baik, kurikulum yang relevan dengan industri, serta iklim ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik secara optimal. Pendidikan memang dapat meningkatkan peluang ekonomi individu, tetapi

efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar kerja, kualitas pendidikan, dan ketersediaan infrastruktur penunjang.



Gambar 4. Data Rata-Rata pengeluaran Tahun 2010-2024
Sumber: BPS (2024)

Pada grafik tersebut menggambarkan perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat Indonesia selama periode 2010 hingga 2024, yang secara umum menunjukkan tren kenaikan berkelanjutan. Perkembangan positif ini menunjukkan peningkatan kemampuan ekonomi rumah tangga, perubahan preferensi dan pola konsumsi, serta transformasi sosial ekonomi yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Pergerakan angka pengeluaran per kapita ini tidak hanya berfungsi sebagai indikator ekonomi, tetapi juga sebagai cerminan kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada fase awal periode, yaitu tahun 2010 hingga 2014, rata-rata pengeluaran mengalami kenaikan yang relatif moderat, dari sekitar 9,4 juta rupiah hingga hampir mencapai 10 juta rupiah. Pertumbuhan stabil ini erat kaitannya dengan kondisi ekonomi nasional yang mulai pulih dari dampak krisis keuangan global 2008-2009. Selain itu, inflasi yang relatif terkendali turut menjaga daya beli masyarakat tetap stabil, sementara ekspansi sektor industri dan jasa membuka lebih banyak peluang kerja, sehingga pendapatan rumah tangga meningkat secara bertahap.

Memasuki periode 2015 hingga 2019, terjadi percepatan pertumbuhan konsumsi yang lebih signifikan. Perkembangan teknologi dan digitalisasi mendorong munculnya pola konsumsi baru, termasuk meningkatnya penggunaan layanan transportasi online, komunikasi digital, serta belanja berbasis *e-commerce*. Pemerintah juga melaksanakan berbagai program pembangunan infrastruktur nasional yang memperbaiki konektivitas dan efisiensi distribusi barang, sehingga turut meningkatkan aktivitas ekonomi. Pada saat yang sama, tumbuhnya kelas menengah menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan pengeluaran per kapita, hingga mencapai lebih dari 11 juta rupiah pada tahun 2019.

Namun, pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan yang mencerminkan dampak langsung pandemi Covid-19 terhadap perekonomian. Pembatasan mobilitas, melemahnya aktivitas perdagangan dan manufaktur, serta penurunan pendapatan terutama di sektor informal menyebabkan tingkat konsumsi menurun. Meskipun fluktuasi ini tidak terlalu besar, hal tersebut menunjukkan tekanan ekonomi yang nyata bagi sebagian rumah tangga, sekaligus menggambarkan kerentanan struktur ekonomi terhadap guncangan eksternal. Sejak 2021, dinamika pengeluaran kembali menunjukkan pemulihan yang kuat, seiring dengan berangsur pulihnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Pendapatan rumah tangga mulai membaik, terutama di sektor yang mampu beradaptasi dengan kondisi pascapandemi. Pada saat yang sama, percepatan adopsi teknologi digital selama pandemi justru memperluas akses konsumsi dan memperkuat daya beli masyarakat. Hal ini membuat tren peningkatan berlanjut hingga tahun 2024, ketika pengeluaran per kapita mencapai lebih dari 12,3 juta rupiah, menjadi titik tertinggi dalam periode pengamatan.

Secara keseluruhan, dinamika pengeluaran per kapita selama 15 tahun ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peningkatan pengeluaran mencerminkan perbaikan standar hidup, sekaligus menegaskan peran penting konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, tren ini juga menunjukkan adanya pergeseran gaya hidup masyarakat dari konsumsi kebutuhan dasar menuju konsumsi yang semakin modern dan berorientasi pada kenyamanan. Faktor kebijakan pemerintah dalam menjaga

stabilitas ekonomi, memberikan perlindungan sosial, serta mempercepat pembangunan turut memperkuat tren ini. Dengan demikian, kurva pengeluaran per kapita bukan hanya menampilkan data ekonomi semata, tetapi juga merepresentasikan perjalanan sosial ekonomi Indonesia dan dinamika kesejahteraan penduduk dalam kurun waktu satu dekade lebih.

Kurva pengeluaran per kapita bukan hanya menampilkan deretan angka ekonomi, tetapi juga menggambarkan perjalanan sosial ekonomi Indonesia secara lebih menyeluruh selama lebih dari satu dekade. Pola kenaikan pengeluaran tersebut merefleksikan perubahan dalam struktur pendapatan, perilaku konsumsi, dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Selain itu, tren tersebut menunjukkan bagaimana dinamika pembangunan, stabilitas harga, serta inovasi teknologi turut membentuk tingkat kesejahteraan penduduk. Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan berbagai faktor struktural yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga, data pengeluaran per kapita menjadi salah satu indikator penting untuk memahami kualitas hidup dan kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, temuan-temuan dari penelitian terdahulu juga memberikan dukungan kuat, sebagaimana studi Jolliffe & Prydz (2016), Sumner et al. (2019), serta Balisacan & Edillon (2020) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran per kapita berkaitan erat dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan.

Namun demikian, pengeluaran per kapita tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan, karena kesejahteraan masyarakat bersifat kompleks dan multidimensional. Beberapa penelitian lebih mutakhir menegaskan bahwa pengukuran kemiskinan perlu mencakup aspek pendidikan, kesehatan, akses air bersih, kualitas perumahan, ketimpangan, hingga kerentanan sosial. Alkire et al. (2017) menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi tidak selalu sejalan dengan penurunan kemiskinan multidimensional, sementara Ferreira et al. (2016) menunjukkan bahwa perubahan pada pengeluaran tidak akan efektif mengurangi kemiskinan jika ketimpangan pendapatan dan akses layanan dasar tidak diperbaiki. Handa & Natali (2018) juga menemukan bahwa peningkatan konsumsi sering kali bersifat sementara, terutama ketika ditopang

oleh bantuan tunai atau pinjaman, sehingga tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan jangka panjang.

Kemiskinan merupakan fenomena ekonomi multidimensional yang berakar pada ketidaksetaraan struktural, meskipun berbagai instrumen kebijakan pembangunan telah diupayakan secara masif. Di Indonesia, dinamika kemiskinan menunjukkan tren yang fluktuatif namun mengalami kelambatan penurunan yang bersifat persisten (*sticky poverty*). Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan sempat mencapai titik terendah sebesar 25,14 juta orang pada tahun 2019, namun melonjak drastis akibat guncangan pandemi COVID-19 sebelum akhirnya kembali menurun bertahap menjadi 25,22 juta orang pada Maret 2024. Meskipun terdapat tren pemulihan pascapandemi, pencapaian ini masih menyisakan tantangan besar karena belum mampu memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mematok angka kemiskinan di kisaran 6,5% hingga 7%, sementara realisasi saat ini masih tertahan di angka 9,03%.

Pentingnya penanggulangan kemiskinan di Indonesia menjadi semakin nyata saat dilakukan perbandingan dalam konteks regional ASEAN. Negara-negara seperti Malaysia dan Thailand telah berhasil mempertahankan tingkat kemiskinan pada level yang sangat rendah, bahkan Malaysia mendekati angka 0% melalui sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Vietnam dan Filipina pun mencatat lompatan signifikan melalui peningkatan akses pendidikan yang agresif dan stabilitas harga pangan. Sebaliknya, dengan jumlah penduduk miskin yang masih berada di atas angka 25 juta jiwa, Indonesia menunjukkan ketertinggalan dalam hal kualitas pembangunan manusia dan pemerataan kesejahteraan jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut.

Kesenjangan antara realitas dan target ini terlihat jelas pada ambisi pemerintah untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0% pada tahun 2024. Kenyataannya, penurunan di lapangan berjalan lambat dan cenderung stagnan akibat adanya ketidakselarasan struktural (*structural mismatch*), di mana peningkatan variabel determinan seperti pendidikan dan pengeluaran belum mampu secara optimal mentransmisikan dampak positifnya terhadap penurunan

angka kemiskinan nasional. Fenomena ini mengindikasikan adanya hambatan dalam mekanisme transmisi kebijakan, sehingga intervensi yang ada saat ini belum cukup kuat untuk mendorong masyarakat keluar dari jerat kemiskinan struktural.

Kesenjangan pencapaian ini dipengaruhi secara signifikan oleh interaksi variabel makroekonomi dan sosial, khususnya inflasi, pendidikan, dan pengeluaran. Dari perspektif moneter, inflasi menjadi faktor krusial karena kenaikan harga kebutuhan pokok secara langsung menggerus daya beli riil (*real purchasing power*) masyarakat rentan. Di sisi lain, meskipun Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia terus meningkat hingga mencapai 8,77 tahun pada 2023, efektivitasnya sering kali terhambat oleh minimnya relevansi keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja formal. Demikian pula dengan pengeluaran per kapita yang cenderung meningkat, namun tidak serta merta mencerminkan perbaikan kesejahteraan jangka panjang jika tidak dibarengi dengan stabilitas harga dan pemerataan akses layanan dasar.

Kompleksitas fenomena ini diperparah oleh adanya ketidakkonsistenan temuan (*research gap*) dalam literatur terdahulu, di mana pengaruh inflasi, pendidikan, dan pengeluaran terhadap kemiskinan sering kali menunjukkan hasil yang tidak linier dan bergantung pada stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan urgensi kegagalan pencapaian target nasional, kesenjangan capaian di ASEAN, serta adanya celah teoretis tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengevaluasi dinamika kemiskinan di Indonesia melalui model empiris yang komprehensif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Inflasi, Pendidikan, dan Rata-Rata Pengeluaran terhadap Kemiskinan di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, pendidikan, dan rata-rata pengeluaran terhadap kemiskinan. Sehingga pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia
2. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia
3. Apakah Rata-Rata pengeluaran berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia
4. Apakah Terdapat pengaruh inflasi, Pendidikan dan rata-rata pengeluaran terhadap kemiskinan di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh rata-rata pengeluaran terhadap kemiskinan di Indonesia
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi, pendidikan, dan rata-rata Pengeluaran terhadap kemiskinan di Indonesia secara simultan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak seperti berikut:

1. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sumber keilmuan dalam menambah referensi ilmiah dalam bidang ekonomi dan pembangunan

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam menambah pengetahuan dalam melakukan penelitian dengan topik yang berkaitan dengan kemiskinan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi apa saja yang dapat memengaruhi kemiskinan dan menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1 Kemiskinan

Secara teoritis, kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang mencerminkan ketidakmampuan individu maupun rumah tangga dalam memenuhi hak-hak dasarnya guna mempertahankan taraf hidup yang layak. Dalam perspektif ekonomi modern, kemiskinan tidak lagi dipandang secara sempit hanya sebagai rendahnya tingkat pendapatan semata, melainkan mencakup aspek kegagalan kapasitas (*capability deprivation*) dalam mengakses sumber daya esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial (Sen, 1999). kemiskinan dibedakan menjadi dua kategori utama (Kuncoro, 2010), yaitu:

1. Kemiskinan Absolut, terjadi ketika seseorang atau rumah tangga tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, berdasarkan standar garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Kemiskinan absolut sering digunakan sebagai ukuran universal untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai negara.
2. Kemiskinan Relatif, merupakan kondisi ketika seseorang memiliki tingkat pendapatan lebih rendah dibandingkan dengan standar hidup rata-rata di suatu wilayah, yang mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kemiskinan relatif lebih sering digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi dalam suatu masyarakat dan menyoroti kesenjangan pendapatan antar kelompok sosial.

Sebagai indikator makro ekonomi yang fundamental, jumlah penduduk miskin berfungsi mengukur efektivitas redistribusi pendapatan dan inklusivitas pembangunan suatu negara. Penurunan angka ini secara konsisten mencerminkan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam memperluas lapangan kerja serta menjaga stabilitas harga. Dalam konteks nasional, upaya ini dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menetapkan target ambisius sebesar 0% pada tahun 2024. Pencapaian target tersebut diukur melalui ambang batas pengeluaran sebesar \$1,90 PPP (*Purchasing Power Parity*) per hari, yang menuntut adanya sinkronisasi kebijakan antara penguatan daya beli masyarakat dan penyediaan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran.

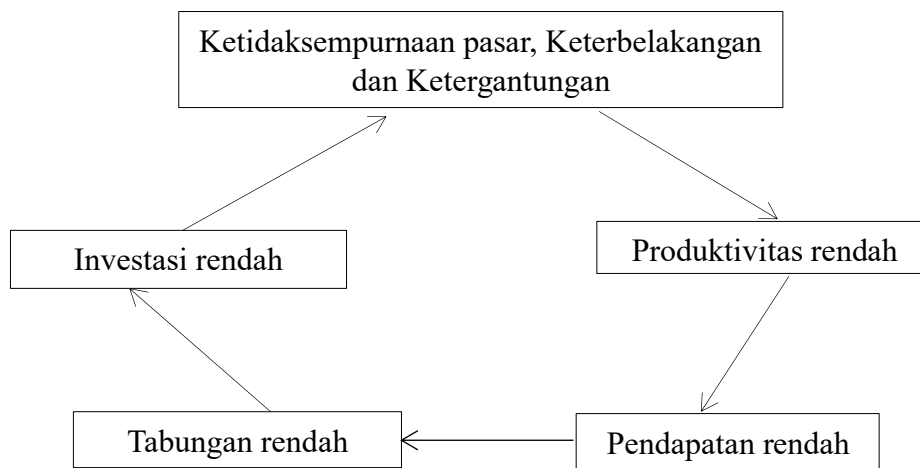
Dalam rangka melakukan penghitungan secara empiris di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menerapkan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang menitikberatkan pada kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan dan non-pangan. Komponen utama dalam pendekatan ini adalah Garis Kemiskinan Makanan (GKM), yaitu nilai pengeluaran minimum untuk pangan yang disetarakan dengan standar kecukupan gizi sebesar 2.100 kilokalori (kkal) per kapita per hari. Penetapan standar 2.100 kkal ini merujuk pada standar kecukupan gizi nasional (WNPG) yang merupakan ambang batas fisiologis minimum bagi seorang individu untuk dapat hidup sehat serta berfungsi secara produktif dalam aktivitas ekonomi.

Secara operasional, Garis kemiskinan (GK) menurut BPS per september 2025 mencapai Rp 641.443 per kapita per bulan secara nasional. Angka ini merupakan ambang batas pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (setara 2.100 kalori/hari) dan non-makanan (perumahan, sandang, Pendidikan, Kesehatan).

2.1.2 Teori Kemiskinan

Teori yang digunakan yaitu Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Cycle of Poverty*) oleh Ragnar Nurkse (1953). Teori tersebut mengemukakan bahwa kemiskinan yang tidak mempunyai ujung dan pangkalnya yang mana semua unsur yang menyebabkan tingkat kemiskinan akan saling berhubungan. Lingkaran Setan Kemiskinan oleh Ragnar Nurkse (1953) memaparkan bahwa kemiskinan (ketidaksejahteraan) beserta terjadinya ketidaksempurnaan pasar, ketertinggalan, serta keterbelakangan masyarakat menimbulkan produktivitas

yang rendah. Ketidakefisienan pasar merupakan suatu fenomena yang terjadi akibat dari tidak adanya efisiensi dalam mekanisme perekonomian.



Gambar 2. 1 Lingkaran Setan Kemiskinan (Ragnar Nurkse, 1953)

2.1.3 Pengukuran Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik dilakukan melalui dua tahap. Pertama, BPS menentukan garis kemiskinan menggunakan pendekatan *Cost of Basic Needs* (CBN), yaitu dengan menghitung kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. Setelah garis kemiskinan diperoleh, indikator kemiskinan seperti persentase penduduk miskin (P0), kedalaman kemiskinan (P1), dan keparahan kemiskinan (P2) dihitung menggunakan indeks Foster–Greer–Thorbecke (FGT). Indeks FGT dipilih karena mampu mengukur tidak hanya jumlah penduduk miskin, tetapi juga kedalaman dan keparahan kemiskinan. Menurut Todaro dan Smith (2012), indeks FGT merupakan indikator yang digunakan sebagai ukuran absolut dari kelas miskin. Indeks ini memberikan gambaran mengenai kemiskinan dan ketimpangan dalam populasi dengan memberikan bobot yang lebih besar kepada individu yang berada jauh di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, pengukuran kemiskinan tidak hanya melihat jumlah penduduk miskin, tetapi juga sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin. Perhitungan indeks kemiskinan tersebut dirumuskan sebagai berikut.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^H \left[\frac{Y_p - Y_i}{Y_p} \right]^{\alpha}$$

P_{α} = Indeks kemiskinan Foster Greer Thorbecke

N = jumlah penduduk

H = Jumlah penduduk miskin

Y_p = garis kemiskinan.

Y_i = pendapatan atau pengeluaran individu ke-I yang berada dibawah garis kemiskinan

α = parameter yang menunjukkan jenis ukuran kemiskinan

2.2.1 Inflasi

Secara konseptual, inflasi dipahami sebagai fenomena ekonomi yang ditandai dengan kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu (Boediono, 2001). Menurut teori Keynesian, inflasi terjadi ketika permintaan agregat melampaui kapasitas penawaran dalam perekonomian (*demand-pull inflation*). Kondisi ini dipicu oleh ekspansi moneter maupun defisit anggaran yang mendorong konsumsi melampaui batas kemampuan produksi nasional. Dalam operasionalisasi penelitian ini, tingkat inflasi diprosikan melalui Indeks Harga Konsumen (IHK). Penggunaan indeks harga konsumen sangat krusial karena indikator ini mengukur rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Dalam konteks analisis kemiskinan, indeks harga konsumen berfungsi sebagai penentu nilai riil dari pengeluaran per kapita rumah tangga. Kenaikan indeks harga konsumen mencerminkan peningkatan biaya hidup (*cost of living*) yang secara langsung menggerus daya beli (*purchasing power*) masyarakat.

Kaitan erat antara inflasi dengan pengeluaran per kapita rumah tangga terletak pada mekanisme transmisi harga. Ketika indeks harga konsumen meningkat, nilai nominal pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar (seperti standar 2.100 kkal dan kebutuhan non-

pangan) menjadi tidak lagi mencukupi. Hal ini menyebabkan pengeluaran per kapita riil mengalami kontraksi. Bagi rumah tangga miskin, fenomena ini bersifat fatal karena struktur pengeluaran mereka didominasi oleh komoditas pangan yang bersifat inelastis; artinya, meskipun harga naik, mereka tidak bisa mengurangi konsumsi di bawah ambang batas fisik tertentu. Inflasi dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel yang menekan tingkat pengeluaran per kapita rumah tangga di tingkat riil. Jika laju kenaikan IHK melampaui pertumbuhan pendapatan nominal rumah tangga, maka rata-rata pengeluaran per kapita akan jatuh di bawah Garis Kemiskinan. Dengan demikian, IHK bukan sekadar indikator harga umum, melainkan determinan utama yang menentukan apakah pengeluaran per kapita suatu rumah tangga masih mampu menjangkau standar kebutuhan hidup minimum atau justru terjebak dalam kemiskinan.

2.2.1 Teori Inflasi Struktural

Teori inflasi struktural dikembangkan oleh ekonom Amerika Latin seperti Raúl Prebisch, Celso Furtado, dan kelompok strukturalis ECLA/CEPAL pada tahun 1950. Teori ini menjelaskan bahwa inflasi di negara berkembang tidak terutama disebabkan oleh peningkatan permintaan atau faktor moneter, tetapi berakar pada ketidakseimbangan yang telah lama tertanam dalam struktur ekonomi. Ketidakseimbangan tersebut meliputi keterbatasan kapasitas produksi, distribusi barang yang tidak efisien, rendahnya produktivitas pertanian, serta tingginya ketergantungan terhadap barang impor. Menurut pendekatan strukturalis, penawaran agregat di negara berkembang cenderung kaku sehingga tidak mampu menyesuaikan diri ketika permintaan meningkat. Kekakuan ini berkaitan dengan lemahnya investasi, infrastruktur, teknologi, dan dominasi sektor informal. Kondisi tersebut membuat inflasi muncul bahkan tanpa perubahan kebijakan moneter yang signifikan.

Sektor pertanian menjadi perhatian utama dalam teori ini karena produktivitasnya yang rendah dan sifatnya yang sangat rentan terhadap gangguan. Kenaikan harga pangan sering kali menjadi pemicu inflasi dan berdampak langsung pada masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu,

sistem distribusi yang tidak efisien menyebabkan ketidakmerataan pasokan dan perbedaan harga antarwilayah. Teori ini juga menekankan bahwa ketergantungan impor meningkatkan kerentanan terhadap perubahan harga internasional dan nilai tukar, sehingga mendorong terjadinya *imported inflation*. Di sisi lain, ketimpangan pendapatan memperkuat tekanan inflasi dan melemahkan daya beli kelompok miskin.\

2.2.2 Hubungan Teori Inflasi Struktural Dan Kemiskinan

Inflasi, dalam perspektif Keynes dan para ekonom klasik maupun modern, dipahami sebagai suatu proses kenaikan harga secara umum dan berkelanjutan yang terjadi ketika permintaan agregat meningkat melebihi kapasitas penawaran yang tersedia. Kenaikan harga yang berlangsung terus-menerus tersebut menyebabkan nilai riil uang mengalami penurunan sehingga daya beli masyarakat melemah. Dalam konteks perekonomian negara berkembang, penjelasan mengenai inflasi tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor struktural yang menghambat penyesuaian penawaran terhadap perubahan permintaan. Oleh karena itu, Teori Inflasi Struktural memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk memahami mengapa inflasi di negara berkembang sering berlangsung lama dan sulit dikendalikan hanya dengan instrumen kebijakan moneter konvensional.

Teori ini berpandangan bahwa inflasi terutama bersumber dari ketidakseimbangan jangka panjang yang melekat pada struktur ekonomi, antara lain keterbatasan kapasitas produksi industri, produktivitas pertanian yang rendah, inefisiensi sistem distribusi barang, serta ketergantungan yang tinggi pada barang impor. Ketika struktur ekonomi tidak fleksibel dan memiliki banyak hambatan internal, penawaran agregat menjadi kaku (*inelastic*). Dalam kondisi tersebut, setiap peningkatan permintaan baik yang berasal dari konsumsi rumah tangga, investasi, maupun belanja pemerintah akan lebih mudah memicu kenaikan harga daripada peningkatan output. Dengan demikian, sekalipun otoritas moneter tidak melakukan ekspansi likuiditas, tekanan inflasi tetap dapat muncul akibat ketidakseimbangan penawaran struktural.

Sektor pertanian menjadi salah satu contoh nyata dalam kerangka teori ini. Di banyak negara berkembang, produktivitas pertanian cenderung rendah karena terbatasnya penggunaan teknologi, minimnya akses terhadap input produksi berkualitas, dan ketidakpastian kondisi alam. Akibatnya, pasokan pangan domestik rentan terganggu, sehingga harga pangan mudah mengalami kenaikan. Kenaikan harga pangan ini memiliki efek ganda. Selain menstimulasi inflasi umum, juga menurunkan kesejahteraan kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya ditujukan untuk kebutuhan pangan. Di samping itu, sistem distribusi barang yang tidak efisien, misalnya akibat keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, atau praktik perdagangan oligopolistik yang menyebabkan adanya perbedaan harga yang lebar antarwilayah, sehingga inflasi tidak hanya tinggi tetapi juga tidak merata. Ketergantungan besar pada impor semakin memperburuk kerentanan struktural tersebut. Harga barang impor dipengaruhi oleh dinamika pasar internasional dan fluktuasi nilai tukar. Ketika nilai tukar melemah atau harga komoditas global meningkat, biaya impor akan naik dan mendorong terciptanya inflasi yang bersumber dari luar negeri (*imported inflation*). Kondisi ini terjadi tanpa harus ada perubahan fundamental dalam permintaan domestik, sehingga menunjukkan bahwa akar persoalan inflasi seringkali berada pada struktur ekonomi yang rapuh.

Inflasi struktural memiliki implikasi langsung terhadap tingkat kemiskinan. Rumah tangga miskin sangat sensitif terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok karena sebagian besar pendapatan mereka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan transportasi. Ketika harga-harga tersebut meningkat, daya beli mereka menurun secara signifikan dan berpotensi mendorong sebagian rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam. Selain itu, ketimpangan distribusi pendapatan yang telah lama mengakar menyebabkan kelompok miskin tidak mampu mengikuti laju kenaikan harga. Kenaikan inflasi tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan yang sepadan, sehingga kesenjangan sosial semakin melebar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inflasi struktural bukan hanya persoalan ekonomi jangka pendek yang dapat diatasi dengan

pengendalian moneter semata. Inflasi ini merupakan refleksi dari persoalan mendasar dalam struktur ekonomi yang membutuhkan pendekatan kebijakan jangka panjang, seperti peningkatan produktivitas sektor pertanian, pembenahan infrastruktur distribusi, penguatan industri domestik untuk mengurangi ketergantungan impor, serta perbaikan tata kelola ekonomi. Tanpa reformasi struktural tersebut, inflasi akan terus memberikan tekanan berat terutama kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan kerentanan ekonomi, dan memperburuk tingkat kemiskinan secara keseluruhan.

2.3.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) yang bersifat fundamental dalam memperkuat struktur ekonomi nasional. Dalam perspektif ekonomi makro, urgensi pendidikan dijelaskan melalui Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*), yang menegaskan bahwa individu dapat meningkatkan kapasitas produktif serta potensi penghasilannya melalui akumulasi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh selama masa sekolah (Simanjuntak, 2001). Investasi ini dipandang memiliki *rate of return* yang tinggi karena setiap tambahan tahun pendidikan diyakini berkontribusi langsung pada peningkatan produktivitas marginal pekerja, yang pada gilirannya akan memperbesar peluang individu untuk memasuki pasar kerja formal dengan tingkat upah yang lebih kompetitif.

Dalam operasionalisasi penelitian ini, tingkat pendidikan diproksikan melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Pemilihan rata-rata lama sekolah sebagai proksi sangat krusial karena indikator ini merepresentasikan stok modal manusia (*human capital stock*) yang tersedia di suatu wilayah secara kuantitatif. Rata-Rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun rata-rata yang telah ditempuh oleh penduduk (biasanya usia 25 tahun ke atas) dalam mengenyam pendidikan formal. Secara teoritis, semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin besar modal intelektual yang dimiliki masyarakat, yang berbanding lurus dengan kemampuan dalam mengadopsi teknologi, inovasi,

serta peningkatan efisiensi ekonomi yang menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Hubungan antara peningkatan rata-rata lama sekolah dengan pengentasan kemiskinan terjadi melalui mekanisme transmisi pendapatan riil. Melalui durasi pendidikan yang lebih lama, individu tidak hanya memperoleh sertifikasi formal, tetapi juga peningkatan kemampuan kognitif dan manajerial yang dibutuhkan oleh sektor industri modern. Hal ini memberikan akses terhadap pekerjaan yang menawarkan upah layak dan jaminan sosial, sehingga mampu memutus rantai kemiskinan struktural. Sebaliknya, rendahnya rata-rata lama sekolah sering kali menjadi penghambat yang menyebabkan rumah tangga terjebak dalam sektor informal dengan produktivitas rendah dan kerentanan ekonomi yang tinggi (*low-skill trap*). Dengan demikian, dalam model penelitian ini, rata-rata lama sekolah diposisikan sebagai variabel determinan utama yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia dalam menekan angka kemiskinan melalui jalur peningkatan daya saing dan pendapatan masyarakat.

2.3.2 Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*)

Teori Modal Manusia merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu ekonomi yang menekankan bahwa pendidikan dan keterampilan merupakan bentuk investasi individu yang dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan ekonomi. Gagasan ini diperkenalkan oleh Theodore W. Schultz dan dikembangkan lebih lanjut oleh Gary S. Becker, yang menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan memiliki peran sentral dalam membuka peluang ekonomi yang lebih baik, termasuk peningkatan pendapatan dan kualitas hidup (Becker, 1993). Dalam pandangan teori ini, pendidikan tidak hanya diposisikan sebagai kebutuhan sosial, tetapi lebih dari itu, berfungsi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kapasitas kerja, daya saing di pasar tenaga kerja, dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan (Schultz, 1961). Oleh karena itu, investasi di bidang pendidikan dipandang sebagai fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan, terutama di negara berkembang.

Bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, akses terhadap pendidikan yang berkualitas menjadi kunci utama dalam upaya keluar dari kondisi kemiskinan yang bersifat struktural. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga mampu meningkatkan pendapatan secara riil serta mengurangi ketergantungan pada sektor informal yang cenderung tidak stabil. Sebaliknya, keterbatasan akses pendidikan akan memperkuat posisi kelompok miskin dalam pekerjaan bergaji rendah dan mempersempit peluang mobilitas sosial. Teori modal manusia banyak digunakan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan sumber daya manusia, seperti program wajib belajar, bantuan pendidikan, serta pelatihan keterampilan kerja sebagai upaya pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

2.3.3 Hubungan Teori Modal Manusia Dan Kemiskinan

Keterkaitan antara aspek pendidikan dan fenomena kemiskinan dalam paradigma ekonomi pembangunan berlandaskan pada proses pembentukan modal manusia. Pendidikan tidak lagi dipandang secara sempit sebagai kegiatan sosial semata, namun telah diakui sebagai bentuk investasi strategis yang mampu menghimpun pengetahuan, keterampilan, serta keahlian teknis pada diri seseorang. Becker (1993) memaparkan bahwa akumulasi modal manusia melalui jalur pendidikan memberikan kontribusi langsung terhadap penguatan produktivitas marginal tenaga kerja. Bagi kelompok masyarakat rentan, penguatan produktivitas ini merupakan syarat fundamental untuk memperbaiki posisi tawar di pasar kerja, yang pada akhirnya membuka jalan bagi perolehan tingkat penghasilan yang lebih sejahtera. Pengembangan kapasitas individu lewat jalur pendidikan juga menciptakan efisiensi alokatif yang krusial dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Selaras dengan pemikiran Simanjuntak (2001), setiap penambahan durasi pendidikan membekali individu dengan kapabilitas untuk mengasimilasi informasi secara lebih efektif serta meningkatkan daya adaptasi terhadap transformasi teknologi. Kemampuan adaptasi tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk beralih dari sektor informal yang

penuh ketidakpastian menuju sektor pekerjaan formal yang lebih menjanjikan jaminan ekonomi jangka panjang.

Secara sistemis, pendidikan memiliki peran krusial sebagai instrumen pemutus siklus kemiskinan struktural atau yang kerap diistilahkan sebagai *poverty trap*. Todaro dan Smith (2012) menguraikan bahwa minimnya akses terhadap pendidikan yang bermutu merupakan determinan utama yang mengikat individu dalam jeratan produktivitas serta pendapatan yang rendah. Melalui investasi modal manusia, potensi mobilitas sosial vertikal terbuka lebar, di mana ekspektasi imbal hasil pendidikan (*return to education*) berupa upah yang lebih tinggi di masa depan menjadi motor penggerak bagi individu untuk keluar dari zona kemiskinan. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini menempatkan pendidikan sebagai variabel kunci yang secara teoritis diproyeksikan memberikan kontribusi positif dalam menekan angka kemiskinan secara konsisten.

2.4.1 Rata-Rata Pengeluaran

Rata-rata pengeluaran merupakan indikator fundamental dalam analisis kesejahteraan dan identifikasi tingkat kemiskinan. Dalam studi ekonomi pembangunan, pengeluaran konsumsi dipandang sebagai proksi yang lebih akurat untuk mengukur standar hidup dibandingkan pendapatan. Hal ini didasarkan pada Teori Pendapatan Permanen (*Permanent Income Hypothesis*) yang dikemukakan oleh Milton Friedman, di mana konsumsi rumah tangga cenderung lebih stabil karena mencerminkan ekspektasi pendapatan jangka panjang, sementara pendapatan saat ini cenderung fluktuatif, khususnya pada kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal. Secara konseptual, rata-rata pengeluaran mencerminkan total alokasi sumber daya rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebagai dasar penghitungan garis kemiskinan. Pengeluaran ini dikategorikan ke dalam dua kelompok utama:

1. Pengeluaran Makanan: mencakup seluruh komoditas bahan pokok, makanan jadi, hingga tembakau.

2. Pengeluaran Non Makanan: meliputi biaya perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta barang dan jasa lainnya.

Meskipun peningkatan pengeluaran sering dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan, dalam konteks ekonomi makro perlu dibedakan antara kenaikan konsumsi riil dan kenaikan nominal. Fenomena "*Distress Consumption*" menunjukkan bahwa kenaikan pengeluaran sering kali bukan disebabkan oleh peningkatan kualitas hidup, namun akibat tekanan harga kebutuhan pokok (inflasi) yang memaksa rumah tangga mengeluarkan biaya lebih besar untuk mempertahankan tingkat konsumsi minimum. Sesuai dengan Hukum Engel, rumah tangga miskin cenderung mengalokasikan persentase yang sangat besar dari total pengeluaran mereka untuk pangan. Oleh karena itu, sensitivitas rata-rata pengeluaran terhadap perubahan harga menjadikannya variabel yang sangat relevan untuk menganalisis dampak inflasi terhadap kedalaman kemiskinan. Dalam penelitian ini, rata-rata pengeluaran per kapita digunakan sebagai variabel kunci karena kemampuannya dalam menangkap dinamika daya beli dan efektivitas modal manusia (pendidikan) dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara riil. Penggunaan indikator ini konsisten dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) yang memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi standar pengeluaran minimum yang ditetapkan.

2.4.2 Teori Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Approach*)

Lahirnya konsep Kebutuhan Dasar atau *Basic Needs Approach* pada pertengahan dekade 1970-an diprakarsai oleh pemikir ekonomi pembangunan seperti Paul Streeten, serta mendapatkan dukungan luas dari institusi global seperti *International Labour Organization* (ILO) dan Bank Dunia. Pendekatan ini hadir sebagai respons kritis atas paradigma pembangunan tradisional yang menitikberatkan pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) namun kerap mengabaikan pemerataan kesejahteraan di lapisan masyarakat bawah. Dalam perspektif ini, kemiskinan dipahami bukan sekadar sebagai rendahnya pendapatan agregat, melainkan sebagai kondisi ketidakmampuan rumah tangga dalam menjangkau standar kebutuhan fisik minimum demi

keberlangsungan hidup yang bermartabat. Cakupan kebutuhan dasar tersebut menyangkut kebutuhan fundamental, meliputi pangan, ketersediaan air bersih, fasilitas sanitasi, layanan kesehatan, akses pendidikan, serta hunian yang layak. Menurut pandangan Streeten, indikator keberhasilan pembangunan terletak pada kemampuan sistem ekonomi dalam memenuhi kebutuhan fundamental masyarakat secara berkelanjutan.

Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional menjadi kurang bermakna apabila penduduk miskin masih terisolasi dari akses barang dan jasa publik yang mendasar. Prioritas utama dari kerangka pemikiran ini adalah menjamin ketersediaan konsumsi minimum yang diperlukan bagi fungsi biologis dan sosial manusia. Konsekuensinya, pengeluaran konsumsi rumah tangga dipandang sebagai indikator yang paling valid untuk mengidentifikasi tingkat kemiskinan, karena variabel tersebut merefleksikan daya beli nyata dalam mengakuisisi komoditas esensial yang diperlukan untuk mencapai standar hidup minimum. Aspek pangan menduduki posisi paling sentral dalam teori ini mengingat sifatnya sebagai kebutuhan primer yang mendesak. Ketidacukupan dalam pencapaian standar kalori harian sering kali menjadi indikator utama dalam mengklasifikasikan kemiskinan ekstrem. Di sisi lain, *Basic Needs Approach* juga memandang pentingnya aksesibilitas terhadap pelayanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan sebagai modal untuk memperkuat kapabilitas manusia di masa depan. Keterbatasan anggaran rumah tangga untuk membiayai kebutuhan non-makanan mengindikasikan rendahnya kualitas hidup serta tingginya risiko ekonomi yang dihadapi. Secara substantif, teori ini memberikan landasan bagi kebijakan pemerintah untuk melakukan intervensi langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar sebagai strategi utama memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan standar kesejahteraan publik secara menyeluruh.

2.4.3 Hubungan Teori Kebutuhan Dasar Dan Kemiskinan

Keterkaitan antara Teori Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Approach*) dan kemiskinan terletak pada pergeseran paradigma dari pengukuran moneter murni menuju penilaian terhadap kualitas hidup riil. Pendekatan ini

memandang kemiskinan bukan sekadar masalah rendahnya pendapatan, melainkan sebuah bentuk deprivasi multidimensional terhadap akses kebutuhan fisik dan sosial minimum yang fundamental. Secara konseptual, seseorang diklasifikasikan berada dalam jerat kemiskinan apabila gagal memenuhi standar minimum konsumsi nutrisi pangan serta layanan jasa publik esensial seperti air bersih, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan. Hubungan ini memberikan landasan operasional bagi penggunaan variabel rata-rata pengeluaran sebagai indikator kesejahteraan, dimana pengeluaran dipandang sebagai cermin daya beli nyata rumah tangga dalam menjangkau paket kebutuhan dasar tersebut. Apabila tingkat pengeluaran berada di bawah nilai moneter kebutuhan fisik minimum, maka secara otomatis individu tersebut berada dalam kondisi prasejahtera.

Selain itu, teori ini menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar memiliki hubungan kausalitas yang kuat dengan produktivitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan akses terhadap pendidikan bukan sekadar bentuk konsumsi, melainkan investasi strategis yang mampu meningkatkan kapasitas kerja dan efisiensi alokatif individu. Dengan terpenuhinya standar hidup dasar, individu memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari garis kemiskinan melalui peningkatan pendapatan yang stabil. Sebaliknya, ketidakmampuan untuk menjangkau kebutuhan ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), di mana rendahnya konsumsi berujung pada lemahnya kualitas fisik dan intelektual, yang pada akhirnya melanggengkan kondisi kemiskinan tersebut. Dalam penelitian ini, Teori Kebutuhan Dasar berfungsi sebagai instrumen untuk menganalisis bagaimana fluktuasi ekonomi dan tingkat pendidikan secara kolektif memengaruhi kemampuan masyarakat dalam melampaui ambang batas kemiskinan.

2.6 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti yang mengajukan beberapa konsep yang relevan dengan penelitian yang

dilakukan penulis. Hasil penelitian sebelumnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian/Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
1.	Sabina Alkire & James Foster (2011) <i>Counting and Multidimensional Poverty Measurement</i>	Variabel : Pendidikan, Kemiskinan multidimensi. Metode : Analisis indeks MPI (<i>Multidimensional Poverty Indeks</i>)	Penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya bersifat moneter, tetapi juga mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Pendidikan terbukti menjadi salah satu dimensi penting dalam menurunkan kemiskinan multidimensi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2.	Francisco H. G. Ferreira, Christoph Lakner, Maria Ana Lugo, Berk Ozler (2016) <i>Growth, Inequality, and Poverty Reduction</i>	Variabel : Pengeluaran per kapita, Kemiskinan. Metode : Studi lintas negara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran per kapita berkontribusi signifikan terhadap Penurunan kemiskinan. Namun, dampak tersebut menjadi kurang efektif apabila ketimpangan pendapatan masih tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi perlu bersifat inklusif agar manfaatnya dirasakan oleh kelompok miskin.
3.	Dean Jolliffe & Espen Beer Prydz (2016) <i>Estimating International Poverty Lines from Comparable National Thresholds</i>	Pengeluaran rumah tangga, Kemiskinan. Metode : Analisis komparatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengeluaran rumah tangga merupakan indikator kesejahteraan yang lebih stabil dibandingkan pendapatan, terutama di negara berkembang. Pengeluaran riil yang meningkat secara konsisten berkorelasi dengan penurunan tingkat kemiskinan.

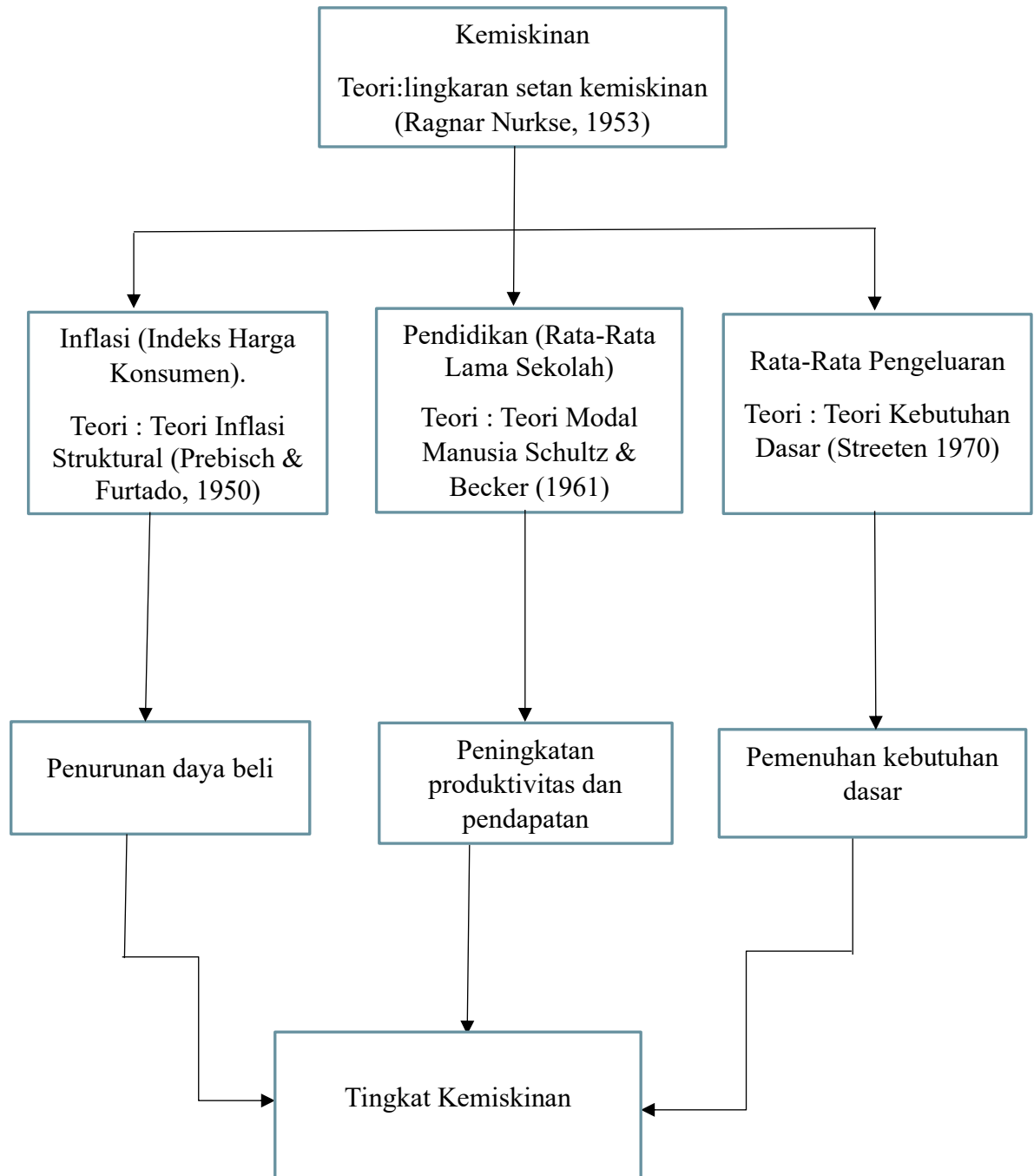
No.	Penelitian/Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
4.	Sabina Alkire, José Manuel Roche, Maria Emma Santos (2017) <i>Multidimensional Poverty Index 2017: Analysis and Policy Implications</i>	Konsumsi, Kemiskinan multidimensi. Metode : Analisis indeks MPI(Multidimension)	Penelitian menunjukkan peningkatan konsumsi atau pengeluaran tidak selalu sejalan dengan penurunan kemiskinan multidimensi. Hal ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan perlu mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan akses layanan dasar.
5	Sudhanshu Handa & Luisa Natali (2018) <i>Cash Transfers, Poverty, and Inequality: Evidence from Developing Countries</i>	Bantuan sosial, Konsumsi, Kemiskinan. Metode : Evaluasi kebijakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek. Namun, tanpa dukungan kebijakan struktural seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas pendidikan, bantuan sosial belum mampu menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.
6	Rahmat Siregar & Sri Wahyuni (2021) Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia	Inflasi, Kemiskinan. Metode : Regresi data panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Kenaikan harga kebutuhan pokok menyebabkan penurunan daya beli masyarakat berpendapatan rendah, sehingga semakin banyak penduduk yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa stabilitas harga merupakan faktor penting dalam pengendalian kemiskinan.
7	Agus Wicaksono (2019) Dampak Inflasi Pangan terhadap Kemiskinan di	Inflasi pangan, Kemiskinan. Metode : Regresi panel	Penelitian ini menemukan bahwa inflasi pangan memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh

No.	Penelitian/Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
	Indonesia		sebagian besar pendapatan rumah tangga miskin digunakan untuk konsumsi pangan, sehingga kenaikan harga pangan secara langsung mengurangi kesejahteraan dan meningkatkan kerentanan perekonomian penduduk miskin.
8	Siti Hasanah (2020) Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Tertinggal Indonesia	Pendidikan, Kemiskinan. Metode : Regresi panel	Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah belum berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan daerah tertinggal. Keterbatasan lapangan kerja, rendahnya penyerapan tenaga kerja terdidik, serta ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan kerja menjadi faktor utama penghambat peran pendidikan dalam mengurangi kemiskinan.
9	Rina Yuliani & Hamdan (2020) Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia	Inflasi, Pengangguran, Kemiskinan. Metode : Regresi panel	Penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak selalu berpengaruh langsung terhadap kemiskinan. Dampak inflasi terhadap kemiskinan sangat bergantung pada kondisi pengangguran, distribusi pendapatan, serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.
10	Dewi Saputri & Ahmad Maulana (2022) Pengaruh Pengeluaran Per Kapita terhadap	Pengeluaran per kapita, Kemiskinan. Metode : Regresi panel	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, khususnya di wilayah perkotaan.

No.	Penelitian/Judul	Alat Analisis/Variabel	Hasil
	Kemiskinan di Wilayah Perkotaan Indonesia		Peningkatan pengeluaran mencerminkan meningkatnya kemampuan konsumsi rumah tangga yang berdampak pada perbaikan kesejahteraan dan penurunan jumlah penduduk miskin.

2.7 Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan studi literatur penelitian sebelumnya, faktor-faktor yang dihipotesiskan mempengaruhi kemiskinan di Indonesia ada tiga yaitu inflasi, pendidikan, dan rata-rata pengeluaran.



2.8 Hipotesis

Hipotesis : Kemiskinan (Y) dipengaruhi oleh variabel Inflasi (X1), Pendidikan (X2), dan Rata-Rata Pengeluaran (X3).

1. Diduga terdapat pengaruh positif Inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Diduga terdapat pengaruh negatif Pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia
3. Diduga terdapat pengaruh negatif Rata-Rata Pengeluaran terhadap kemiskinan di Indonesia

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder merupakan data yang diolah dan dipublikasikan oleh institusi ataupun lembaga yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut.

Tabel 3. Ringkasan Variabel Penelitian

No	Nama Variabel	Satuan	Sumber
1	Kemiskinan	Ribu Jiwa	BPS
2	Inflasi	Indeks	BPS
3	Pendidikan	Persen	BPS
4	Rata-Rata Pengeluaran	Ribuan Rupiah	BPS

Metode analisis yang digunakan adalah analisis data panel, yaitu gabungan antara data *cross section* (antarprovinsi) dan *time series* (antarwaktu). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh jumlah observasi yang lebih besar dan ragam data yang lebih luas, sehingga estimasi yang dihasilkan cenderung lebih akurat dibandingkan penggunaan salah satu jenis data saja. Gujarati dan Damodar (2004) menekankan bahwa data panel memiliki sejumlah keunggulan, seperti kemampuannya menangkap heterogenitas antarindividu dan memperlihatkan dinamika hubungan variabel sepanjang waktu. Oleh sebab itu, metode panel dipandang paling sesuai untuk menganalisis perkembangan fenomena ekonomi dan sosial antarprovinsi dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup analisis mencakup 34 provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2015 hingga 2024. Pemilihan 34 provinsi dilakukan agar konsistensi data dapat terjaga selama rentang waktu penelitian. Walaupun jumlah provinsi Indonesia saat ini telah bertambah

menjadi 38, 4 provinsi baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya baru dibentuk pada tahun 2022-2023. Pemekaran wilayah tersebut menyebabkan adanya perubahan batas administratif yang membuat data statistik untuk provinsi-provinsi baru tidak tersedia secara lengkap sejak tahun 2015. Dengan demikian, hanya 34 provinsi yang memenuhi syarat ketersediaan data secara konsisten dan berkelanjutan selama seluruh periode analisis.

Rentang waktu penelitian 2015 hingga 2024 dipilih berdasarkan pertimbangan metodologis dan ketersediaan data. Tahun 2015 menjadi titik awal karena sejak tahun tersebut BPS mulai menyediakan data yang lebih terstandarisasi, konsisten, dan dapat diakses secara merata untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian seperti inflasi, pendidikan, rata-rata pengeluaran dan jumlah penduduk miskin. Sebelum tahun 2015, beberapa variabel belum tersedia sepenuhnya di seluruh provinsi atau mengalami perubahan metode pencatatan, sehingga kurang ideal untuk analisis jangka panjang. Pemilihan tahun awal 2015 memungkinkan penelitian memanfaatkan data yang stabil dan berkualitas sehingga hasil estimasi yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan berfokus pada 34 provinsi yang telah eksis sebelum pemekaran wilayah serta menggunakan periode data yang konsisten sejak 2015 hingga 2024, penelitian ini mampu menghindari data yang tidak tersedia dan mempertahankan keselarasan struktur wilayah sepanjang waktu. Kondisi ini memastikan bahwa perubahan nilai variabel yang diamati benar-benar menggambarkan perkembangan ekonomi dan sosial, bukan dipengaruhi oleh perubahan administratif. Konsistensi wilayah dan periode tersebut juga memberikan fondasi yang lebih kuat bagi model estimasi dan meningkatkan validitas internal penelitian. Oleh sebab itu, pemilihan cakupan wilayah dan periode tersebut merupakan langkah metodologis yang tepat untuk menghasilkan analisis yang bermutu dan akurat.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan penjabaran sistematis yang digunakan peneliti untuk mendeskripsikan secara jelas dan terukur setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat dan tiga variabel bebas. Adapun definisi operasional variabel dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1 Kemiskinan

Dalam penelitian ini variabel kemiskinan diukur menggunakan persentase penduduk miskin pada masing-masing provinsi di Indonesia sebagaimana dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Persentase penduduk miskin menggambarkan proporsi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Indikator ini digunakan karena merupakan ukuran resmi kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah serta telah menjadi acuan utama dalam berbagai kajian empiris dan perumusan kebijakan publik di tingkat nasional maupun regional.

Pemanfaatan persentase penduduk miskin sebagai indikator kemiskinan memungkinkan penelitian ini untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarprovinsi dan antarwaktu secara konsisten, sehingga sesuai dengan pendekatan analisis data panel yang digunakan. Selain itu, penggunaan data kemiskinan yang bersumber dari BPS menjamin keterbandingan, keandalan, dan validitas data, karena data tersebut dihitung berdasarkan metodologi statistik yang terstandar dan diperbarui secara berkala. Penelitian ini tidak melakukan perhitungan indeks kemiskinan secara mandiri, melainkan menggunakan data kemiskinan yang telah dihitung dan dipublikasikan oleh BPS. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara variabel kemiskinan dan faktor-faktor ekonomi yang memengaruhinya, tanpa melakukan penghitungan ulang indikator kemiskinan, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan relevan untuk kajian kebijakan ekonomi regional.

3.2.2 Inflasi

Inflasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu perekonomian pada periode tertentu. Secara operasional, inflasi diukur melalui persentase perubahan tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK), yang menggambarkan perubahan tingkat harga yang dihadapi rumah tangga. Variabel ini digunakan untuk mencerminkan kondisi kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat pada masing-masing wilayah. Pengukuran inflasi dalam penelitian ini menggunakan tingkat inflasi tahunan (dalam persen) sebagaimana dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat inflasi dihitung berdasarkan perubahan persentase IHK dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan, sehingga menggambarkan dinamika perubahan harga antarwaktu secara konsisten.

Dalam penelitian ini, inflasi diukur pada 34 provinsi di Indonesia yang memiliki ketersediaan data lengkap, dengan periode pengamatan tahun 2015 hingga 2024. Data yang digunakan disusun dalam bentuk data panel, sehingga memungkinkan analisis dilakukan baik secara temporal maupun antarwilayah. Dengan pendekatan tersebut, variabel inflasi dapat digunakan sebagai indikator yang relevan untuk menilai dampak perubahan harga terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat antarprovinsi selama periode penelitian.

3.2.3 Pendidikan

Variabel pendidikan dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yaitu jumlah rata-rata tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas. Indikator ini dinyatakan dalam satuan tahun dan diperoleh dari data resmi yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pemilihan Rata-Rata Lama Sekolah sebagai indikator pendidikan didasarkan pada pertimbangannya yang mampu menunjukkan tingkat pencapaian pendidikan penduduk secara kuantitatif, sehingga memudahkan analisis perbandingan baik antarwilayah

maupun antarwaktu. Semakin tinggi nilai Rata-Rata Lama Sekolah suatu provinsi, semakin tinggi pula tingkat pendidikan penduduknya, yang secara teoritis berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam penelitian ini, Rata-Rata Lama Sekolah diukur pada 34 provinsi di Indonesia yang memiliki data lengkap dan konsisten, dengan periode pengamatan tahun 2015 hingga 2024. Data Rata-Rata Lama Sekolah tersebut merupakan hasil pengukuran tahunan pada masing-masing provinsi dalam rentang waktu tersebut, sehingga dapat dianalisis baik secara temporal maupun spasial. Dengan definisi operasional ini, variabel pendidikan dapat digunakan sebagai indikator yang relevan untuk menilai perkembangan kualitas pendidikan penduduk serta hubungannya dengan variabel lain dalam model penelitian.

3.2.4 Rata-Rata Pengeluaran

Rata-rata pengeluaran merupakan variabel yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan konsumsi rumah tangga dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Variabel ini mencerminkan jumlah pengeluaran rata-rata yang dikeluarkan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Rata-rata pengeluaran sering dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan karena besarnya pengeluaran rumah tangga umumnya berhubungan erat dengan tingkat pendapatan, kondisi sosial ekonomi, dan daya beli masyarakat.

Dalam penelitian ini, rata-rata pengeluaran dioperasionalkan sebagai rata-rata pengeluaran per kapita per tahun di setiap provinsi di Indonesia. Nilai ini diperoleh berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) atau publikasi relevan lainnya. BPS menghitung rata-rata pengeluaran dengan membagi total pengeluaran rumah tangga dalam suatu provinsi dengan jumlah penduduk atau jumlah rumah tangga, sesuai metodologi yang ditetapkan dalam publikasi statistik tahunan. Pemanfaatan data tahunan per provinsi memungkinkan analisis dilakukan secara komprehensif terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat dari tahun ke tahun selama periode penelitian.

Pengeluaran yang dimaksud mencakup dua kelompok besar, yaitu:

1. Pengeluaran makanan, meliputi bahan makanan pokok, lauk-pauk, sayur, buah, minuman, serta konsumsi lainnya yang dikategorikan sebagai kebutuhan pangan.
2. Pengeluaran nonmakanan, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, pakaian, transportasi, komunikasi, serta berbagai kebutuhan nonpangan lainnya.

Rata-rata pengeluaran dalam penelitian ini dinyatakan dalam satuan rupiah per kapita per tahun, sesuai standar perhitungan yang digunakan oleh BPS. Pengukuran variabel ini dilakukan pada 34 provinsi di Indonesia yang memiliki data lengkap dan konsisten, dengan rentang waktu pengamatan mulai tahun 2015 hingga 2024. Dengan menggunakan periode dan cakupan wilayah tersebut, data rata-rata pengeluaran dapat dianalisis secara temporal antar tahun dan secara spasial antarprovinsi dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Peningkatan nilai rata-rata pengeluaran dari tahun ke tahun dapat menunjukkan meningkatnya kemampuan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, sementara nilai yang stagnan atau menurun dapat mengindikasikan tekanan ekonomi atau penurunan daya beli

3.3 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, untuk memberikan kajian hasil yang lebih objektif. Sehingga, hasil penelitian ini bersifat independen dari subjektif peneliti. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Data panel yaitu gabungan dari data kurun waktu (*time-series*) dari tahun 2015-2023 dan data deret lintang (*cross-section*) sebanyak 34 Provinsi di Indonesia. Menggunakan data *time series* dan *cross section* secara bersamaan memungkinkan penambahan jumlah observasi lebih mudah dilakukan secara signifikan tanpa melakukan *treatment* tertentu pada data. Sehingga, analisis data lebih memuaskan. Model yang akan diestimasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 INF_{it} + \beta_2 PEND_{it} + \beta_3 RPP_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

Y	= Kemiskinan (jumlah penduduk)
β_0	= Intersep (konstanta)
$\beta_1 X_1$	= Inflasi
$\beta_2 X_2$	= Pendidikan
$\beta_3 X_3$	= Rata-Rata Pengeluaran
ε_{it}	= Error term

3.4. Prosedur Analisis Data

3.4.1 Metode Estimasi Regresi Data Panel

Dalam metode regresi data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang umum digunakan untuk mengestimasi model, yaitu pendekatan *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Ketiga pendekatan ini memiliki karakteristik dan asumsi yang berbeda dalam menangani variabilitas data antar unit dan antar waktu.

3.4.1.1 Common Effect Model (CEM)

Metode Common Effect (CEM) merupakan salah satu teknik dasar dalam analisis regresi data panel yang digunakan untuk mengestimasi parameter model secara sederhana. Pendekatan ini menyatukan data *cross section* (antar individu atau wilayah) dan *time series* (antar waktu) menjadi satu kesatuan tanpa membedakan karakteristik antar individu maupun periode waktu (Gujarati, 2012). Dalam model CEM, diasumsikan bahwa struktur hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah seragam untuk seluruh observasi, baik antar individu maupun antar waktu. Dengan kata lain, model ini menganggap tidak ada perbedaan *individual effect* atau *time effect* yang memengaruhi hasil estimasi. Bentuk persamaan model *Common Effect* sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 \text{Log} X_{3it} + \mu_{it}$$

Y_{it} = Nilai variabel dependen untuk unit ke-iii pada waktu ke-t

$X_{1it}, X_{2it}, X_{3it}$ = Nilai variabel independen untuk unit ke-i pada waktu ke-t

β_0 = Nilai konstanta (*intercept*)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel bebas

μ_{it} = *error term*

3.4.1.2 Fixed Effect Model (FEM)

Metode *Fixed Effect* berasumsi bahwa setiap unit observasi (misalnya provinsi) memiliki nilai intersep yang berbeda, namun memiliki kemiringan (slope) yang sama antar unit. Artinya, perbedaan karakteristik masing-masing provinsi yang tidak berubah sepanjang waktu (*time-invariant*) ditangkap melalui perbedaan nilai intersep. Untuk mengakomodasi perbedaan ini, digunakan pendekatan *Least Square Dummy Variable* (LSDV), yaitu dengan menambahkan variabel dummy untuk masing-masing entitas lintas individu. Dengan pendekatan ini, model dapat mengontrol perbedaan tetap yang tidak dapat diobservasi secara langsung namun dapat memengaruhi hasil estimasi, sehingga menghasilkan model yang lebih akurat dalam menjelaskan variasi data panel antar waktu dan antar individu. Persamaan *Least Square Dummy Variable* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{1it} + \mu_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel dependen individu ke-i dan unit waktu ke-t

X_{1it}, X_{2it} = Variabel independen individu ke-i dan unit waktu ke-t

D_1, D_2, \dots, D_n = 1 untuk lintas individu yang berpengaruh dan 0 untuk lintas individu yang tidak berpengaruh

β_0 = Konstanta atau *intercept*

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

μ_{it} = *Error term*

3.4.1.3 Random Effect Model (REM)

Pendekatan *Random Effect Model* (REM) digunakan dalam regresi data panel untuk menangkap kemungkinan adanya perbedaan intersep antar unit observasi (misalnya provinsi), namun diasumsikan bahwa perbedaan tersebut

bersifat random dan tidak berkorelasi dengan variabel independen dalam model. Berbeda dengan *Fixed Effect*, model ini mengasumsikan bahwa efek individual berasal dari distribusi acak dan menjadi bagian dari *error term*. Metode ini juga mempertimbangkan adanya potensi korelasi dalam *error term*, baik dalam dimensi lintas individu (*cross-section*) maupun waktu (*time series*), sehingga REM sering dianggap lebih efisien apabila asumsi tersebut terpenuhi. Secara umum, persamaan dasar dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + w_{it}$$

Dengan *error term* dinyatakan sebagai:

$$w_{it} = \varepsilon_{it} + \mu_{it}$$

Keterangan: Random Effect Model

- Y_{it} = Variabel dependen pada unit ke-i dan waktu ke-t
- X_{1it}, X_{2it} = Variabel independen pada unit ke-i dan waktu ke-t
- β_0 = Konstanta atau intersep
- β_1, β_2 = Koefisien regresi masing-masing variabel
- w_{it} = Komponen error gabungan
- ε_i = Komponen error spesifik untuk masing-masing individu (*random effect*)
- μ_{it} = Komponen error acak yang bersifat umum (idiosinkratik)

Karena struktur error terdiri dari dua komponen, yaitu efek individual acak ε_i dan error umum μ_{it} , maka REM juga dikenal dengan istilah *Error Components Model* (ECM). Model ini cocok digunakan ketika efek individu tidak berkorelasi dengan variabel independen dan dapat dianggap sebagai bagian dari error yang dapat dimodelkan secara efisien.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui dan menguji validitas model yang digunakan dalam penelitian. Agar pengujian hipotesis berdasarkan model analisis tidak bisa atau bahkan menyesatkan, maka perlu digunakan uji asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik sebagai berikut:

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menguji apakah variabel dependen dan independen dari model regresi telah terdistribusi normal. Untuk mengetahui normalitas data adalah dengan menggunakan metode analisis grafik melalui histogram atau melihat nilai *probability Jarque Bera*. Uji normalitas bertujuan untuk distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan hubungan linear antar variabel independen dalam regresi. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independen dalam suatu regresi. Model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terdapat hubungan linear antar variabel independen. Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*independen*). Apabila terjadi kolerasi antara variabel bebas, maka terdapat problem multikolinieritas (multikol) pada model regresi tersebut. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah dibawah 0,05 jika kolerasi kuat maka terjadi problem multikolinearitas.

3.4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah hubungan yang menunjukkan residual pada satu observasi dengan residual observasi lainnya. Untuk mengetahui autokorelasi dalam model regresi adalah dengan menggunakan nilai pada Durbin Watson.

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas. Artinya, varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain benar-benar tetap.

3.4.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

3.4.3.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan sebagai langkah awal untuk menentukan model estimasi data panel yang sesuai, khususnya dalam memilih antara *Common Effect Model* (CEM) atau (*Fixed Effect Model*) (FEM). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya perbedaan intersep antar unit observasi signifikan dan perlu dimasukkan ke dalam model. Dalam pengujian ini, hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H_0 = Model *Common Effect* lebih tepat (tidak terdapat perbedaan intersep antar unit)

H_1 = Model *Fixed Effect* lebih tepat (terdapat perbedaan intersep antar unit)

Apabila P-Value lebih kecil < dari taraf nyata $\alpha = 5\%$ maka model *Fixed Effect* lebih tepat, namun apabila P-Value lebih besar > dari taraf nyata $\alpha = 5\%$ maka model *Common Effect* yang lebih tepat (Gujarati, 2012). Dengan kata lain, model *Fixed Effect* akan dipilih apabila terdapat perbedaan karakteristik tetap antar unit (misalnya antar provinsi) yang memengaruhi hasil estimasi dan tidak dapat ditangkap oleh model *Common Effect*.

3.4.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan metode statistik yang digunakan untuk menentukan model estimasi data panel yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah efek individual (per unit observasi) berkorelasi dengan variabel independen dalam model. Hipotesis yang digunakan dalam Uji Hausman adalah sebagai berikut:

H_0 = Model *Random Effect* (REM)

H_1 = Model *Fixed Effect* (FEM)

Penentuan model dilakukan dengan membandingkan nilai *Chi-Square* hitung terhadap nilai *Chi-Square* tabel. Jika *Chi-Square* hitung > *Chi-Square* tabel, maka H_0 ditolak dan model *Fixed Effect* lebih layak digunakan. Sebaliknya,

jika *Chi-Square* hitung < *Chi-Square* tabel, maka H_0 diterima dan *Random Effect* Model dianggap lebih tepat. Selain itu, keputusan juga dapat didasarkan pada nilai probabilitas (*P-value*). Jika $p\text{-value} < \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak dan FEM dipilih sebagai model terbaik. Namun jika $P\text{-value} > \alpha$, maka H_0 tidak ditolak dan REM tetap digunakan sebagai model yang lebih efisien (Gujarti, 2012).

3.4.3.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan apakah model *Random Effect* lebih tepat digunakan dibandingkan dengan model *Common Effect* dalam estimasi data panel. Dalam pengujian ini, Hipotesis yang terbentuk dalam uji LM adalah sebagai berikut :

H_0 = *Common Effect Model* (CEM)

H_1 = *Random Effect Model* (REM)

Keputusan terhadap model yang dipilih didasarkan pada nilai probabilitas dari uji Breusch-Pagan. Jika nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$), maka H_0 ditolak, dan model *Random Effect* dianggap lebih sesuai untuk menggambarkan data. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas melebihi 5%, maka H_1 diterima, sehingga model *Common Effect* dinilai lebih layak digunakan dalam analisis (Gujarati, 2012).

3.4.4 Uji Hipotesis

3.4.4.1 Uji t Statistik

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual(parsial), dengan menganggap variabel lain bersifat konstanta (Gujarati & Porter). Uji t-statistik merupakan pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji t-statistik dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikansi. Jika probabilitas > tingkat signifikansi, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dalam penelitian ini, uji-t adalah sebagai berikut:

H_0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H_1 > terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Hipotesis Variabel Inflasi

H_{01} : $\beta_1 = 0$, Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Indonesia

H_{a1} : $\beta_1 > 0$, Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

2. Hipotesis Variabel Pendidikan

H_0 : $\beta_1 = 0$, Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

H_a : $\beta_1 < 0$, Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

3. Hipotesis Variabel Rata-Rata Pengeluaran

H_0 : $\beta_1 = 0$, Rata-Rata Pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

$H_a = \beta_1 < 0$, Rata-Rata Pengeluaran berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

3.4.4.2 Uji F Statistik

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh simultan pada variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen, nilai F-statistik dibandingkan dengan tingkat signifikansi α . Jika probabilitas $< \alpha$ yang ditentukan maka suatu variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependennya. Hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0 = \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = 0$, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \neq 0$ artinya secara bersama-sama ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengambilan keputusan dalam uji F-simultan adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai F-statistik $<$ tingkat signifikansi α , maka H_0 ditolak dan menerima H_1 , artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.
2. Jika nilai F-statistik $>$ tingkat signifikansi α , maka H_0 diterima dan menolak H_1 , artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

3.4.5 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar proporsi varians dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi (Gujarati, 2012). Nilai R^2 berada dalam rentang antara 0 hingga 1. Apabila R^2 bernilai 0, maka hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, semakin mendekati nilai 1, maka semakin besar pula pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, jika R^2 mendekati 1, hal tersebut menunjukkan pengaruh lebih besar dari faktor independen terhadap variabel dependen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2015-2024. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan inflasi (dalam kondisi moderat) justru menurunkan kemiskinan, terutama karena sebagian besar rumah tangga miskin bekerja di sektor pertanian dan sektor informal yang mendapatkan manfaat dari kenaikan harga komoditas pertanian.
2. Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia selama periode penelitian. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, semakin rendah tingkat kemiskinan suatu provinsi, sejalan dengan teori modal manusia yang menekankan peran pendidikan dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan.
3. Rata-Rata pengeluaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Peningkatan pengeluaran rumah tangga tidak mencerminkan peningkatan kesejahteraan, tetapi menggambarkan tekanan biaya hidup yang lebih besar akibat kenaikan harga kebutuhan pokok yang memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga miskin.
4. Inflasi, pendidikan, dan rata-rata pengeluaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, yang dibuktikan dengan hasil uji F-statistik sebesar 0.000000. Dengan demikian, model regresi panel yang digunakan layak (fit) dalam menjelaskan variasi kemiskinan antarprovinsi selama 2015-2024.
5. Model penelitian ini mampu menjelaskan tingkat kemiskinan sekitar 35 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti ketimpangan pendapatan, kualitas infrastruktur, kesehatan, kesempatan kerja, dan efektivitas program perlindungan sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu menjaga stabilitas inflasi pada tingkat yang moderat, karena inflasi yang terlalu rendah dapat mencerminkan lemahnya aktivitas ekonomi, sedangkan inflasi yang stabil dan terkendali dapat meningkatkan pendapatan sektor informal dan pertanian. Namun, pemerintah tetap harus mengantisipasi inflasi pangan yang berlebihan melalui penguatan cadangan pangan nasional, perbaikan distribusi logistik, serta pengawasan harga barang kebutuhan pokok.
2. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan harus diperkuat, terutama di provinsi dengan rata-rata lama sekolah rendah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: pemerataan guru berkualitas, peningkatan sarana pendidikan di daerah tertinggal, pengembangan pendidikan vokasi, dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan pelajar dari keluarga miskin. Pendidikan yang lebih baik diperlukan untuk menekan kemiskinan secara berkelanjutan.
3. Kenaikan rata-rata pengeluaran yang berdampak meningkatkan kemiskinan perlu ditangani melalui penguatan daya beli rumah tangga miskin. Pemerintah dapat meningkatkan efektivitas bantuan sosial, memperluas akses UMKM terhadap modal, dan menyesuaikan upah minimum berdasarkan inflasi regional. Strategi ini membantu mencegah rumah tangga jatuh ke dalam konsumsi terpaksa (*distress consumption*).
4. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus bersifat multidimensional, tidak hanya berfokus pada aspek pendapatan. Pemerintah perlu mempertimbangkan indikator kemiskinan multidimensional yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, sanitasi, perumahan, dan akses air bersih agar intervensi kebijakan lebih tepat sasaran dan mencerminkan kondisi kesejahteraan secara lebih komprehensif.

5. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran, ketimpangan (*Gini Ratio*), atau infrastruktur daerah. Selain itu, penggunaan metode ekonometrika yang lebih kompleks seperti *dynamic panel* data atau *spatial econometrics* dapat memberikan hasil yang lebih mendalam dalam memahami pola kemiskinan antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackley, G. (1963) *Macroeconomic theory*. New York: Macmillan.
- Alamsyah, H. (2008). Persistensi Inflasi dan dampaknya terhadap pilihan dan respons kebijakan moneter di Indonesia.
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7–8), 476–487.
- Alkire, S., Roche, J. M., & Santos, M. E. (2017). Multidimensional Poverty Index 2017: Analysis and policy implications. Oxford: Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI).
- Alkire, S., Roche, J. M., & Seth, S. (2017). *Multidimensional Poverty Index 2017: The most detailed picture to date of the world's poorest people*. Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford.
- Amalia, Y., & Putri, M. (2022). Efektivitas upah minimum terhadap pengentasan kemiskinan di sektor informal. *Jurnal Ekonomi Ketenagakerjaan*, 8(1), 55–63.
- Amran, T., & Lestari, I. (2021). Pendidikan dan pengentasan kemiskinan di kawasan perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 79–87.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). *Laporan kebijakan fiskal dan inflasi Indonesia tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2022). *Kajian inflasi daerah dan efisiensi logistik nasional*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2022). *Kajian Pengendalian Inflasi dan Ketimpangan Harga di Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Laporan pembangunan ekonomi daerah dan ketimpangan wilayah di Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Indonesia 2023: Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Utara 2019*. Tarakan: BPS Kalimantan Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Analisis kemiskinan Indonesia 2023*. BPS-Statistics Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Bank Dunia. (2022). *Indonesia Economic Prospects: Boosting Productivity through Urbanization*. Washington, DC: World Bank.

- Bank Indonesia. (2023). *Laporan perekonomian Indonesia 2023: Stabilitas harga dan ketahanan ekonomi nasional*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bappenas. (2022). *Kajian pengendalian inflasi daerah berbasis penguatan ketahanan pangan dan logistik*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. University of Chicago Press.
- Bird, K., Hattel, K., & Sasaki, E. (2011). Poverty, Income Inequality, and Microfinance in Thailand. *Southeast Asia Working Paper Series*, 6(November 2011), 1–16.
- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomics* (7th ed.). Boston: Pearson Education.
- Céspedes, L. F., & Velasco, A. (2012). *Macroeconomic performance during commodity price booms and busts*. *IMF Economic Review*, 60(4), 570–599
- Digdowiseiso, K. (2010). Education and poverty in Indonesia: A cross-province analysis. *Asian Social Science*, 6(11), 31–38.
- Dornbusch, R., Fisher, S., & Startz, R. (2008). *Macroeconomics*. McGraw-Hill.
- Ferreira, F. H. G., Chen, S., & Dabalén, A. (2016). *Income inequality and the persistence of poverty in developing countries*. World Bank Policy Research Working Paper. The World Bank.
- Ferreira, F. H. G., Lakner, C., Lugo, M. A., & Özler, B. (2016). Growth, inequality, and poverty reduction: A reassessment of the trickle-down hypothesis. *World Development*, 85, 93–109.
- Fischer, S. (1993). The role of macroeconomic factors in growth. *Journal of Monetary Economics*, 32(3), 485–512.
- Friedman, M. (1977). Nobel lecture: Inflation and unemployment. *Journal of Political Economy*, 85(3), 451–472.
- Gujarati, D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2020). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill Education.
- Gujarati, Damodar N. (2004). *Basic Econometrics, Fourth Edition*. Singapore: McGraw-Hill Inc. Ewlinger.
- Handa, S., & Natali, L. (2018). Cash transfers, poverty, and inequality: Evidence from developing countries. *UNICEF Innocenti Working Paper*.
- Handa, S., Natali, L., Seidenfeld, D., Tembo, G., & Davis, B. (2018). Can unconditional cash transfers raise long-term living standards? Evidence from Zambia. *Journal of Development Economics*, 133, 42–65.

- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). *The economic impacts of learning losses*. Paris: OECD Publishing.
- Hariyanti, D., & Soeharjoto, M. (2020). *Analisis Makroekonomi dan Pertumbuhan Berkelanjutan*. *Jurnal Ekonomi Makro*, 12(1), 45-56.
- Hasanah, S. (2020). Pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah tertinggal Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 145-158.
- Hasanah, U. (2020). Apakah pendidikan menurunkan kemiskinan? Studi kasus daerah tertinggal di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 11(1), 34-41.
- Hasibuan, L. S. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan: Implikasi terhadap Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 18(3), 112-125.
- Hidayat, A., & Pratama, R. (2020). Pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di sektor industri. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(3), 201-210.
- Hill, H., & Vidyattama, Y. (2019). *Regional development dynamics in Indonesia: Convergence or divergence? Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(2), 119–142.
- Huang, J., Fang, Y., & Wang, X. (2020). Education, human capital, and poverty reduction in developing countries. *Journal of Asian Economics*, 68, 1–12.
- Jolliffe, D., & Prydz, E. B. (2016). Estimating international poverty lines from comparable national thresholds. *Journal of Economic Inequality*, 14(2), 185–198.
- Kaldor, N. (1966). *Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kingdom: An Inaugural Lecture*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Khalwaty, T. (2000). *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Khalwaty, T. (2006). *Inflasi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Klasen, S., & Wink, C. (2018). Missing women: Revisiting the debate. *Feminist Economics*, 24(2), 64–88.
- Krugman, P. (2021). *Arguing with Zombies: Economics, Politics, and the Fight for a Better Future*. New York: W. W. Norton & Company.
- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics*. Worth Publishers.
- Nadia Islami, Ali Anis (2009) Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*. 938-948.

- Nasution, M., & Wardani, S. (2019). Pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 115–123.
- Omoniyi, M. B. I. (2013). *The Role of Education in Poverty Alleviation and Economic Development: A Theoretical Perspective and Counselling Implications*. British Journal of Arts and Social Sciences, 15(2), 176-185.
- Probosiwi, R. (2016). *Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan*. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 15(2), 89-100.
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. (2018). Returns to investment in education: A decennial review of the global literature. *Education Economics*, 26(5), 445–458.
- Rahayu, N. (2020). Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan: Masih adakah harapan bagi pengentasan kemiskinan? *Jurnal Ketimpangan dan Pembangunan Sosial*, 4(2), 88–95.
- Rizky, A. (2018). Hubungan inflasi dan kemiskinan di Indonesia: Studi antarprovinsi. *Jurnal Ekonomi Regional*, 6(2), 58–66.
- Royat, Sujana. 2015. Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan. Menko Kesra Bidang Koordinasi Pengangguran Kemiskinan. Jakarta
- Samuelson, P. A. (2004). *Economics*. New York: McGraw-Hill.
- Samuelson, Paul A & William D Nordhaus. 1997. Mikroekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Saputri, D., & Maulana, A. (2022). Pengaruh pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di wilayah perkotaan Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 55–68.
- Saputri, D., & Maulana, R. (2022). Inflasi dan kesejahteraan masyarakat miskin: Analisis empiris di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Nasional*, 13(2), 97–105.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Simanjuntak, P. J. (2000). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simanjuntak, R. (2019). Keterkaitan pendidikan dan pekerjaan layak: Evaluasi terhadap penurunan kemiskinan. *Jurnal Sumber Daya Manusia Indonesia*, 5(2), 25–32.
- Siregar, M., & Wahyuniarti, D. (2008). *Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Siregar, R., & Wahyuni, D. (2021). Dampak inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 14(1), 44–52.

- Siregar, R., & Wahyuni, S. (2021). Pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 22(1), 45–58.
- SMERU Research Institute. (2020). *Education inequality in Eastern Indonesia: Challenges and policy options*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Soeharjoto, M., & Danova, A. (2020). *Pembangunan Berkelanjutan dan Indikator Makroekonomi*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 67-80.
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2019). *Analisis Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 34-50.
- Sukirno, Sadono. (2006), *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadodo. (2000). *Makroekonomi Modern*. PT Raja Drafindo Persada: Jakarta
- Suryadarma, D., Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2020). The role of education in poverty reduction: Evidence from Indonesia. *Journal of Development Studies*, 56(4), 673-690.
- Suriyani, N. K., & Sudiartha, I. K. G. (2018). Pengaruh Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*, 7(6).
- Taylor, L. (1983). *Structuralist Macroeconomics: Applicable Models for the Third World*. New York: Basic Books.
- Tilak, J. B. G. (2018). Education and poverty: Revisiting the relationship. *International Journal of Educational Development*, 62, 148-156.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). New York: Pearson Education.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Pearson Education.
- UNICEF. (2018). *Education for every child: Challenges and opportunities in Papua and West Papua*. Jakarta: United Nations Children's Fund.
- Wicaksono, A. (2019). Dampak inflasi pangan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 14(3), 201–214.
- Wicaksono, A., & Lestari, F. (2021). Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan: Bukti dari data panel Indonesia. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 7(1), 33–47.

- Wicaksono, F., & Amir, H. (2021). Education, intergenerational mobility, and poverty reduction in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 345–365.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan EViews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- World Bank. (2021). *East Asia and Pacific Economic Update: Weathering the Pandemic*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2022). *The State of Global Poverty and Economic Challenges*. Washington, DC: World Bank Group.
- Yanuarti (2007). Inflasi Makanan dan Implikasinya terhadap Kebijakan Moneter di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. 58-74.
- Yuliani, R., & Hamdan, M. (2020). Inflasi dan kemiskinan: Analisis jalur pengaruh tidak langsung. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Sosial*, 12(3), 142-150.
- Yuliani, R., & Hamdan. (2020). Inflasi, pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(2), 101-115.
- Yusuf, A., & Resdiana, N. (2021). *Pendidikan dan Kesempatan Kerja di Indonesia: Analisis Empiris*. *Jurnal Sumber Daya Manusia*, 14(3), 98-115.